



PT. BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
BPR 2025**

PT. BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI

2025

**JL.JEND. SUDIRMAN NO. 7D, KOMPLEKS BUSINESS PARK,
PEKANBARU, 28284**

DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN UMUM	1
BAB II	FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR	2
A.	Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola	2
B.	Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	3
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	3
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	7
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	9
C.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
1.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	10
2.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	10
D.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	11
1.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	11
2.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	11
E.	Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	11
1.	Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.....	11
2.	Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	12
3.	Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR.....	12
F.	Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	14
1.	Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	14
2.	Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	14
3.	Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR.....	15

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	16
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	17
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun	17
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	18
K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	19
L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.....	20
M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	21
N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain.....	21



BAB I

PENJELASAN UMUM

Dalam upaya memperkuat keberlanjutan usaha dan meningkatkan kualitas kinerja perusahaan, PT. BPR Putra Mahkota Mandiri terus mengedepankan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) secara disiplin dan terintegrasi di seluruh lini organisasi. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai dasar seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam setiap aktivitas operasional.

Laporan pelaksanaan tata kelola tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para pemangku kepentingan, sekaligus untuk memenuhi ketentuan regulator sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Penyusunan laporan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.

Sepanjang tahun 2025, perusahaan juga terus melakukan penguatan kebijakan internal serta peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian risiko guna memastikan bahwa implementasi tata kelola berjalan secara efektif. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan dinamika lingkungan usaha dan perkembangan regulasi.

Dengan penerapan tata kelola yang baik, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban kepatuhan, tetapi juga berupaya menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, memperkuat kepercayaan nasabah dan mitra kerja, serta menjaga reputasi perusahaan di industri perbankan.

BAB II

FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	JL.JEND. SUDIRMAN NO. 7D, KOMPLEKS BUSINESS PARK, PEKANBARU, 28284
Nomor Telepon	081298404004
Penjelasan Umum	Struktur dan infrastruktur tata kelola Bank telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank secara konsisten menerapkan prinsip tata kelola yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator kinerja dan efektivitas implementasi kebijakan yang masih memerlukan pemantauan serta penyempurnaan lebih lanjut. Bank terus mengupayakan agar tidak terdapat rangkap jabatan guna memitigasi risiko terhadap operasional dan kegiatan usaha Bank. Seiring dengan semakin banyaknya regulasi baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan internal maupun eksternal secara berkelanjutan. Selain itu, Bank akan memperkuat peran fungsi kepatuhan dalam melakukan sosialisasi budaya kepatuhan, penerapan tata kelola yang baik, serta strategi Anti Fraud, guna meminimalisir potensi risiko yang dapat terjadi.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	BPR telah menerapkan struktur, sistem, dan prosedur tata kelola yang memadai, didukung pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris yang kompeten serta menjalankan tugas secara transparan, akuntabel, dan profesional. Fungsi-fungsi penting seperti kepatuhan, audit internal dan eksternal, manajemen risiko, anti fraud, serta integritas pelaporan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip Good Corporate Governance. Rencana Bisnis Bank Tahun 2026 telah disusun secara realistis, terukur, dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta didukung pemegang saham, menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan penguatan



daya saing BPR. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian dan pemantauan berkelanjutan, antara lain: optimalisasi penerapan manajemen risiko, pengendalian BMPK, konsistensi budaya kepatuhan, pemantauan efektivitas pelaporan internal dan teknologi informasi, serta pencapaian beberapa target kinerja keuangan dan non keuangan yang belum sepenuhnya terealisasi. Secara keseluruhan, pelaksanaan tata kelola BPR berjalan baik dengan komitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan guna mendukung keberlanjutan usaha, mitigasi risiko, dan peningkatan kualitas pengawasan serta kinerja perusahaan.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK : -
	Nama : Yuni Wulandari Putri, SE, Ak
	Jabatan : Direktur Utama yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. 4. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi. 5. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BPR. 6. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta meminimalkan Risiko Kepatuhan BPR.



7. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BPR tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dalam melaksanakan tugas, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
9. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah melakukan pencegahan secara optimal namun masih terjadi penyimpangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab Direksi BPR dengan mempertimbangkan cakupan upaya pencegahan yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
10. Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sekurang – kurangnya untuk:
 - Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris
 - Memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris
 - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait
 - Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai.
 - Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia antara lain komitmen dalam Action Plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil pengawasan Bank Indonesia yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT
 - Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan APU dan PPT



	• Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT • Memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) • Mengusulkan Laporan Action Plan dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan 11. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. 12. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan Direktur Utama, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Dewan Komisaris. 13. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.								
2.	<table><tr><td>NIK</td><td>: -</td></tr><tr><td>Nama</td><td>: Syafril, S.Sos</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>: Direktur</td></tr><tr><td>Tugas dan Tanggung Jawab</td><td> 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha BPR dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. 3. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa keuangan yang berlaku. 4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di BPR. 5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. 6. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pejabat yang menangani Manajemen </td></tr></table>	NIK	: -	Nama	: Syafril, S.Sos	Jabatan	: Direktur	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha BPR dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. 3. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa keuangan yang berlaku. 4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di BPR. 5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. 6. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pejabat yang menangani Manajemen
NIK	: -								
Nama	: Syafril, S.Sos								
Jabatan	: Direktur								
Tugas dan Tanggung Jawab	1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha BPR dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. 3. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa keuangan yang berlaku. 4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di BPR. 5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. 6. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pejabat yang menangani Manajemen								



Risiko mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

7. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
8. Dalam rangka mendukung terselenggaranya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* BPR, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.
10. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai ; sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi, program pengembangan pegawai dan mekanisme pemberhentian pegawai.
11. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
12. Melaksanakan keterbukaan informasi, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Perseroan kepada Pemangku Kepentingan.
13. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan BPR.
14. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.



	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1. Untuk menekan lajunya tunggakan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah (NPL), Direksi merekrut karyawan untuk posisi penagihan kredit (kolektor) yang khusus melakukan penagihan dan monitoring kredit bermasalah dengan tujuan untuk menekan lajunya tunggakan kredit dan menyelesaikan kredit bermasalah (NPL). 2. Menindaklanjuti adanya indikasi kecurangan (fraud) dalam proses pemberian kredit, Direksi telah melakukan evaluasi dan penggantian staf marketing yang terlibat. Selain itu, Direksi memastikan bahwa seluruh proses pemberian kredit dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. 3. Bank telah melakukan penggantian tenaga marketing, langkah ini diharapkan dapat membuka peluang pasar baru serta meningkatkan kinerja pemasaran, sehingga pertumbuhan penyaluran kredit dapat lebih optimal. 4. Dalam upaya meningkatkan penyaluran kredit, Direksi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini dilakukan agar potensi risiko dapat diantisipasi sejak dini. 5. Direksi secara berkala melakukan peninjauan (review) terhadap kebijakan dan peraturan internal, agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kondisi usaha terkini.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	NIK : -
	Nama : Herry Amin, SE
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Memimpin dan Mengkoordinasi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi. 2. Mengarahkan Diskusi dan Rapat Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati dan tujuan jangka panjang perusahaan. 3. Menjadi Penghubung antara Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam hal



	pelaporan, keputusan strategis, dan kebijakan yang mempengaruhi operasional Bank. 4. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. 5. Mengevaluasi dan Memimpin Penilaian Kinerja Direksi dengan melibatkan seluruh anggota Dewan Komisaris. 6. memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memahami tugas dan peran mereka dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. 7. Membuat Keputusan Strategis bersama Dewan Komisaris terkait pengawasan dan arahan kebijakan penting dalam jangka panjang. 8. Mengawasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris serta memastikan bahwa Dewan Komisaris bekerja sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan efektif dalam melaksanakan pengawasan.								
2.	<table><tr><td>NIK</td><td>: -</td></tr><tr><td>Nama</td><td>: Fatmawati, SKM, MM</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>: Komisaris</td></tr><tr><td>Tugas dan Tanggung Jawab</td><td> 1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank. 2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 3. Bersama-sama dengan komisaris utama mereview dan menyetujui Rencana Bisnis Bank. 4. Bersama-sama dengan komisaris utama mereview dan menyetujui laporan tahunan. 5. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. 6. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan. 7. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris. </td></tr></table>	NIK	: -	Nama	: Fatmawati, SKM, MM	Jabatan	: Komisaris	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank. 2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 3. Bersama-sama dengan komisaris utama mereview dan menyetujui Rencana Bisnis Bank. 4. Bersama-sama dengan komisaris utama mereview dan menyetujui laporan tahunan. 5. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. 6. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan. 7. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris.
NIK	: -								
Nama	: Fatmawati, SKM, MM								
Jabatan	: Komisaris								
Tugas dan Tanggung Jawab	1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank. 2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 3. Bersama-sama dengan komisaris utama mereview dan menyetujui Rencana Bisnis Bank. 4. Bersama-sama dengan komisaris utama mereview dan menyetujui laporan tahunan. 5. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. 6. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan. 7. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris.								

	8. Menghadiri semua rapat Pemegang Saham. 9. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
	Rekomendasi kepada Direksi: 1. Menekan laju kredit bermasalah (NPL) melalui peningkatan efektivitas penagihan dan pengawasan kredit. 2. Meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara lebih terarah dan berkelanjutan guna menjaga keseimbangan likuiditas. 3. Memperkuat pengendalian internal untuk mencegah terjadinya fraud dalam kegiatan operasional dan pemberian kredit. 4. Direksi disarankan untuk terus mengembangkan strategi pemasaran yang lebih inovatif dan terarah, termasuk optimalisasi peran tenaga marketing baru, guna memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pertumbuhan kredit yang berkualitas. 5. Mengoptimalkan penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, khususnya dalam proses pencairan kredit dan kegiatan operasional, guna meminimalisir potensi risiko. 6. Melakukan pembaruan dan penyempurnaan kebijakan serta prosedur secara berkala agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan kondisi usaha.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
PT. BPR Putra Mahkota Mandiri tidak memiliki Komite

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Yuni Wulandari Putri, SE	Tidak ada	-	-



2	-	Syafril, S.Sos	Tidak ada	-	-
---	---	----------------	-----------	---	---

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Herry Amin, SE	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	60%	60%
2	-	Fatmawati, SKM, MM	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	20%	20%

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Herry Amin, SE	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	60%	60%
2	-	Fatmawati, SKM, MM	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	20%	20%
3	-	Erick Caesarrani Asmara	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	10%	10%
4	-	Alexander	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	10%	10%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	Yuni Wulandari Putri, SE	-	Tidak ada	-
2	-	Syafril, S.Sos	-	Tidak ada	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	Herry Amin, SE	-	1. PT. JASA KARYA UNGGUL PRIMA	11.50
				2. PT. MUSTIKA AGRO SARI	5.00
				3. PT. WANASARI NUSANTARA	5.00
				4. PT. MANDIRI BAKTI NUSANTARA	90.00

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Yuni Wulandari Putri, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Syafril, S.Sos	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Herry Amin, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Fatmawati, SKM, MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Terdapat hubungan keuangan antara Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris dan pemegang saham Erick Caesarrani Asmara dan Alexander masing-masing sebesar 10% dari modal disetor, dimana saham yang dimiliki merupakan hibah dari ibu Fatmawati, yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Herry Amin, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Fatmawati, SKM, MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Terdapat hubungan keuangan antara Ibu Fatmawati, SKM, MM



					selaku Komisaris dan pemegang saham Erick Caesarrani Asmara dan Alexander masing-masing sebesar 10% dari modal disetor, dimana saham yang dimiliki merupakan hibah dari ibu Fatmawati, yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
3	-	Erick Caesarrani Asmara	Tidak Ada	Terdapat hubungan keuangan antara Pemegang Saham dengan Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris sebesar 10% dari modal disetor yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan	Terdapat hubungan keuangan antara Pemegang Saham Erick Caesarrani Asmara dengan Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Pemegang Saham sebesar 10% dari modal disetor yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
4	-	Alexander	Tidak Ada	Terdapat hubungan keuangan antara Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris dan pemegang saham	Terdapat hubungan keuangan antara Pemegang Saham Alexander dengan Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Pemegang Saham sebesar 10% dari modal disetor yang sudah diketahui dan disetujui oleh



				Alexander masing-masing sebesar 10% dari modal disetor yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan
--	--	--	--	---	------------------------

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Yuni Wulandari Putri, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Syafril, S.Sos	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Herry Amin, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Fatmawati, SKM, MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Terdapat hubungan keluarga (ibu dan anak) antara Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris dengan pemegang saham: Erick Caesarrani Asmara dan Alexander yang sudah diketahui dan disetujui oleh



				Otoritas Jasa Keuangan
--	--	--	--	------------------------

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Erick Caesarrani Asmara	Tidak Ada	Terdapat hubungan keluarga (ibu dan anak) antara Erick Caesarrani Asmara dengan ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan	Terdapat hubungan keluarga (ibu dan anak) antara Erick Caesarrani Asmara dengan ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Pemegang Saham yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
2	-	Alexander	Tidak Ada	Terdapat hubungan keluarga (ibu dan anak) antara Erick Caesarrani Asmara dengan ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan	Terdapat hubungan keluarga (ibu dan anak) antara Erick Caesarrani Asmara dengan ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Pemegang Saham yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan



G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp. 153.000.000	2	Rp. 186.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp. 171.000.000	2	Rp. 13.812.500
3.	Tantiem	2	Rp. 20.800.000	2	-
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunersi lainnya	-	-	-	-
	Total Remunerasi		Rp. 344.800.000		Rp. 199.812.500
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan	-	-	-	-
2.	Transportasi	-	-	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4.	Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
	Total Fasilitas Lainnya		-		-
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		Rp. 344.800.000		Rp. 199.812.500

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.21
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.59
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.18

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	27/03/2025	2	1. Evaluasi Kinerja BPR Triwulan ke I Tahun 2025 2. Laporan Tahunan Bank tahun 2024 hasil Audit KAP 3. Tingkat Kesehatan Bank Triwulan I tahun 2025 khususnya peningkatan NPL yang signifikan 4. Pertumbuhan Kredit yang diberikan dan Dana Pihak Ke III 5. Kredit Hapus Buku dan Tunggakan Kredit.
2.	30/06/2025	2	1. Evaluasi Kinerja BPR Triwulan ke II Tahun 2025 2. Pertumbuhan Kredit yang diberikan dan Dana Pihak Ke III Per Triwulan II-2025 3. Evaluasi terhadap Ratio Bank per Triwulan II-2025 4. Penanganan Kredit bermasalah terhadap debitur yang sudah Non Performance terutama kondisi macet 5. Peran Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Petugas Anti Fraud



			6. Penanganan terhadap kredit yang berada pada posisi dalam perhatian khusus yang memiliki tunggakan kredit.
3.	30/09/2025	2	1. Evaluasi Kinerja BPR dan TKS Bank Per Triwulan III-2025 2. Pembahasan terkait penca[ai]an kredit yang diberikan dan Dana Pihak ke III 3. Pembahasan debitur yang sudah Non Performance Loan (NPL) terutama yang macet sekaligus pembentukan CKPN.
4.	31/12/2025	2	1. Evaluasi Kinerja BP Triwulan ke IV Tahun 2025 2. Pembahasan terkait Kredit yang diberikan dan Dana Pihak Ke III 3. Pembahasan posisi sldo Hapus Buku per Desember 2025 4. Pembahasan terkait Tunggakan Kredit dan NPL Bank per Posisi Desember 2025 5. Pembahasan terkait Strategi Bank untuk pencapaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2025.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	-	Herry Amin, SE	4	-	100%
2.	-	Fatmawati, SKM, MM	4	-	100%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	1	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		1		-
Dalam Proses Peyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

Pada periode tahun 2025, terdapat penyimpangan internal / Fraud yang dilakukan oleh karyawan BPR dan telah diselesaikan dengan Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan.



L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	2	-

1. Telah selesai

Pada tahun 2025, terdapat perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru yang telah diputuskan. Gugatan tersebut diajukan oleh 2 (dua) orang debitur, yaitu Muhammad Asrin dan Sri Sumarni, dengan menggunakan jasa kuasa hukum/pengacara. Berdasarkan putusan pengadilan, perkara tersebut dinyatakan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) atau gugatan tidak dapat diterima. Pasca penyelesaian perkara gugatan sederhana tersebut, terdapat perkembangan terkait penyelesaian kewajiban masing-masing debitur ;

- 1) Setelah proses gugatan selesai, debitur a.n. Muhammad Asrin menunjukkan itikad baik dengan berinisiatif melunasi pinjaman di bank, di mana yang bersangkutan telah melunasi kewajiban pokok kredit.
- 2) Sementara itu, debitur a.n. Sri Sumarni hingga saat ini masih berada dalam posisi kredit macet karena debitur telah meninggal dunia. Namun demikian, bank belum mengajukan kembali gugatan sederhana dengan mempertimbangkan efisiensi biaya yang akan dikeluarkan, mengingat baki debit saat ini sebesar Rp. 15 juta. Oleh karena itu, bank masih mempertimbangkan langkah selanjutnya, apakah akan melanjutkan proses gugatan atau menunggu penyelesaian kewajiban melalui pihak ahli waris.

2. Dalam proses penyelesaian

Pada tahun 2025 tidak terdapat kasus hukum perdata maupun pidana lainnya yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan.

3. Uraian penjelasan

Permasalahan hukum yang terjadi merupakan gugatan sederhana yang diajukan oleh Bank terhadap debitur di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Gugatan tersebut telah melalui proses persidangan dan menghasilkan putusan tidak dapat diterima (NO), sehingga tidak berlanjut ke tahap berikutnya.

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			

Selama periode tahun 2025, tidak ditemukan adanya indikasi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Putra Mahkota Mandiri

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1.	21/02/2025	Kegiatan Sosial	Biaya sumbangan untuk kejuaraan nasional tuli antar provinsi tahun 2025	Panitia	-	Rp. 100.000
2.	02/10/2025	Kegiatan Sosial	Biaya sumbangan untuk perbaikan jalan 1 wilayah dengan kantor BPR Putra Mahkota Mandiri	Pemuda Setempat	-	Rp. 100.000



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PUTRA MAHKOTA MANDIRI



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PUTRA MAHKOTA MANDIRI
Selalu ada pada saat dibutuhkan

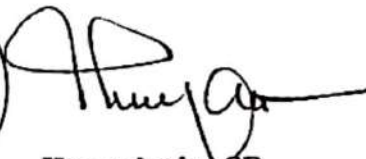
LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA
PT. BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI
TAHUN 2025

Menindaklanjuti pemenuhan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 9 tahun 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, maka dengan ini Direksi dan Komisaris PT. BPR Putra Mahkota Mandiri menyetujui Laporan Transparansi Tata Kelola Tahun 2025 untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Pekanbaru, 22 April 2026
PT. Bank Perekonomian Rakyat
PUTRA MAHKOTA MANDIRI


Yuni Wulandari Putri, SE
Direktur Utama


Herry Amin, SE
Komisaris Utama

Form 0003
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Putra Mahkota Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Pejabat Eksekutif	Alamat	NIK	Jabatan				
			Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Lainnya
DIAH ANSHORY	JL. ALAMANDA PERUM BRITAIN HOUSE BLOK E 17	1302104412820006	00	00	00	00	02
NOVA MELISTY	JL SRI INDRA PERUMAHAN GRIYA BUKIT ASRI BLOK D NO 9	1307015311920001	00	00	02	00	00
SURYA WANDI	JL TRIPANG	1377022810880001	00	00	00	00	02
FITRIA ELTA	PANDAU PERMAI BLOK B	1471096208910001	02	02	00	02	00
ADHE PURNOMO	JALAN KAPAS NO. 10	1471101312820001	00	00	00	00	02

Form 0003
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

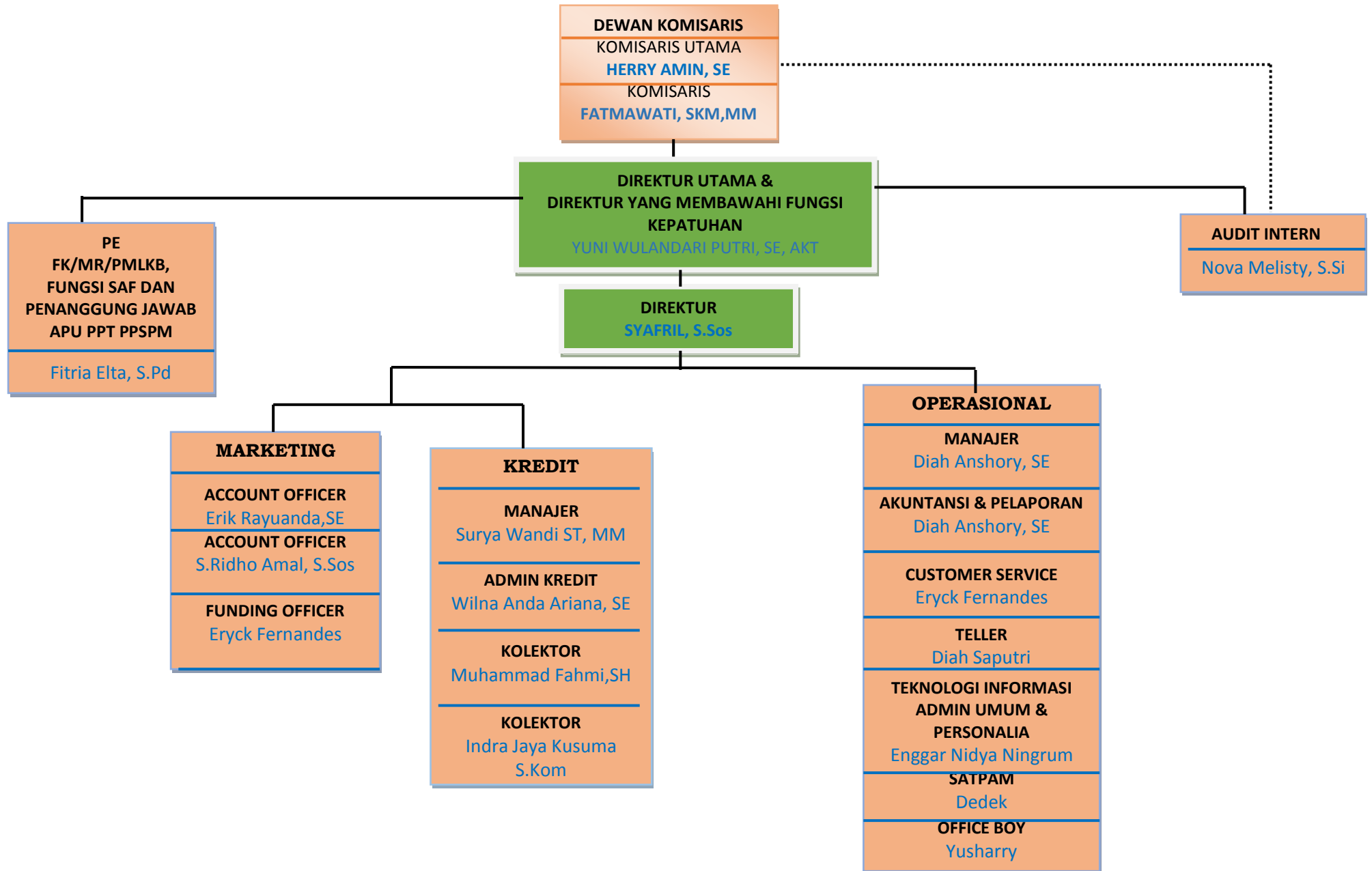
Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Putra Mahkota Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Mulai Menjabat	Surat Pengangkatan		Keanggotaan Komite				Keterangan Terkait Pejabat Eksekutif
	No.	Tanggal	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	
28-09-2020	25	28-09-2020	00	00	00	00	3
02-07-2019	8	02-07-2019	00	00	00	00	3
04-12-2017	29	04-12-2017	00	00	00	00	3
07-08-2017	17	07-08-2017	00	00	00	00	3
08-07-2019	11	08-07-2018	00	00	00	00	3

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI



LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Posisi Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Putra Mahkota Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

(Dalam Satuan Rupiah)

ASET	Des 2025	Des 2024
Kas dalam Rupiah	77.789.400	42.670.600
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Penempatan pada Bank Lain	5.179.784.845	4.420.394.049
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Jumlah	5.257.574.245	4.463.064.649
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	161.630.091	128.596.665
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	13.802.022.526	13.715.215.037
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	673.274.834	258.541.262
Jumlah	13.290.377.783	13.585.270.440
Penyertaan Modal	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Agunan yang Diambil Alih	0	0
Properti Terbengkalai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan Bangunan	0	0
b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	0	0
c. Inventaris	716.179.900	696.265.900
d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	669.268.172	648.824.345
Aset Tidak Berwujud	20.000.000	20.000.000
-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	20.000.000	20.000.000
Aset Lainnya	505.600.347	542.970.030
Total Aset	19.100.464.103	18.638.746.674

(Dalam Satuan Rupiah)

LIABILITAS	Des 2025	Des 2024
Liabilitas Segera	24.264.813	53.224.223
Simpanan		
a. Tabungan	1.604.924.779	1.942.207.565

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Posisi Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Putra Mahkota Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

LIABILITAS	Des 2025	Des 2024
b. Deposito	7.912.000.000	7.717.000.000
Simpanan dari Bank Lain	1.300.000.000	1.750.000.000
Pinjaman yang Diterima	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Lainnya	193.793.191	182.759.075
Total Liabilitas	11.034.982.783	11.645.190.863

(Dalam Satuan Rupiah)

EKUITAS	Des 2025	Des 2024
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	10.000.000.000	10.000.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	4.000.000.000	4.000.000.000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal-Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	219.100.382	167.100.382
b. Tujuan	0	0
Laba (Rugi)		
a. Tahun-tahun Lalu	1.317.325.546	302.337.617
b. Tahun Berjalan	529.055.392	524.117.812
Total Ekuitas	8.065.481.320	6.993.555.811

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Laba Rugi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Putra Mahkota Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

(Dalam Satuan Rupiah)

POS	Des 2025	Des 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual	2.941.802.616	2.764.155.217
b. Provisi Kredit	181.869.903	158.688.156
c. Biaya Transaksi -/-	0	0
Jumlah Pendapatan Bunga	3.123.672.519	2.922.843.373
Pendapatan Lainnya	144.501.503	40.696.730
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	3.268.174.022	2.963.540.103
Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual	642.512.684	625.837.566
b. Biaya Transaksi	0	0
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
Beban Kerugian Penurunan Nilai	247.273.552	81.486.080
Beban Pemasaran	3.677.000	2.768.500
Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
Beban Administrasi dan Umum	1.788.351.498	1.651.870.492
Beban Lainnya	38.501.624	42.082.645
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	2.720.316.358	2.404.045.283
LABA (RUGI) OPERASIONAL	547.857.664	559.494.820
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional	51.578.646	39.197.978
Beban Non Operasional	200.000	300.000
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	51.378.646	38.897.978
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	599.236.310	598.392.798
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	70.180.918	74.274.986
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN	0	0
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	529.055.392	524.117.812
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Laba Rugi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Putra Mahkota Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Des 2025	Des 2024
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	0	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	529.055.392	524.117.812

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Putra Mahkota Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan	Nominal Dalam Satuan Rupiah					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
Surat Berharga	0	0	0	0	0	0
Penempatan pada bank lain	5.179.784.845		0		0	5.179.784.845
Kredit yang diberikan						
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	163.134.807	0	0	0	0	163.134.807
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	10.449.520.950	2.206.337.030	331.214.913	393.729.660	657.653.134	14.038.455.687
Penyertaan Modal	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	15.792.440.602	2.206.337.030	331.214.913	393.729.660	657.653.134	19.381.375.339
Rasio - rasio (%)						
a. KPMM	91,31					
b. Rasio Cadangan terhadap PPKA	100,00					
c. NPL (neto)	5,96					
d. NPL (gross)	9,74					
e. ROA	3,19					
f. BOPO	83,24					
g. NIM	13,85					
h. LDR	149,22					
i. Cash Ratio	16,67					

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN
Laporan Komitmen Kontinjensi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Putra Mahkota Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

(Dalam Satuan Rupiah)

POS	Des 2025	Des 2024
TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen lainnya	0	0
KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	0	0
b. Penerusan kredit	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
TAGIHAN KONTINJENSI	469.692.960	324.539.600
a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian	420.607.694	289.723.234
b. Aset produktif yang dihapus buku	49.085.266	34.816.366
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
KEWAJIBAN KONTINJENSI	0	0
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA	0	0

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Informasi Lainnya

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Putra Mahkota Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Anggota Direksi BPR dan Anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak)	Ultimate Shareholders
DIREKSI	1. HERRY AMIN (60.00%)	Ya	
1. YUNI WULANDARI PUTRI	2. FATMAWATI (20.00%)	Tidak	
2. SYAFRIL	3. ALEXANDER (10.00%)	Tidak	
DEWAN KOMISARIS	4. ERICK CAESARRANI (10.00%)	Tidak	
1. HERRY AMIN			
2. FATMAWATI			

Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: GRISELDA, WISNU DAN ARUM

Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: Alchudri, SE., MM., CPA., CA., CFI

1. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset paling sedikit Rp 10M wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset kurang dari Rp 10M wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau diaudit oleh Akuntan Publik.
3. Informasi keuangan di atas disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR.
4. Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR.
5. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR.
6. Perhitungan rasio keuangan antara lain ROA, BOPO, CR, dan LDR dilakukan sesuai dengan ketentuan terkini dan berlaku sejak posisi laporan bulan Desember 2023.

PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN DAN PERUBAHAN PENTING LAIN

Nama BPR : PT. BPR Putra Mahkota Mandiri

Posisi Laporan : 2025

Perkembangan yang terjadi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2025 terdapat perubahan dalam pelaporan keuangan bank, yaitu dari SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) menjadi SAK EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Penerapan SAK EP ini membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap laporan keuangan bank, terutama dalam perhitungan bunga kredit. Sebelumnya, bank menghitung bunga dengan metode flat murni. Namun, saat ini perhitungan bunga dilakukan secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan metode perhitungan ini berdampak pada perubahan pendapatan bunga dan turut mempengaruhi laba bank.
2. Pemberlakuan penerapan perhitungan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) yang menggantikan pendekatan sebelumnya yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Dengan adanya penerapan CKPN membuat Bank membentuk cadangan kerugian yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Hal ini terjadi karena perhitungan CKPN lebih mempertimbangkan potensi risiko kerugian secara lebih dini. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan beban pencadangan, sehingga pada akhirnya menggerus laba bank.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Nama BPR : PT. BPR Putra Mahkota Mandiri

Posisi Laporan : 2025

Strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR sebagai berikut:

1. Posisi dan Daya Saing BPR

Bank memiliki keunggulan pada suku bunga yang bersaing dan tingkat kesehatan bank yang baik, namun masih menghadapi keterbatasan layanan, jangkauan operasional, serta proses kredit yang relatif lama di tengah persaingan yang semakin ketat dan tantangan kepercayaan masyarakat.

2. Arah Kebijakan Umum

Kebijakan Bank difokuskan pada penguatan tata kelola, manajemen risiko, peningkatan kualitas SDM, efisiensi operasional, pengembangan digitalisasi, serta peningkatan pelayanan dan penghimpunan dana untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat.

3. Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Bank berkomitmen untuk memperkuat penerapan manajemen risiko, kepatuhan, dan fungsi audit internal, serta memastikan seluruh kebijakan dan prosedur selalu diperbarui dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Strategi Penghimpunan Dana (DPK)

Strategi difokuskan pada peningkatan promosi, pelayanan nasabah, suku bunga yang kompetitif, serta pembangunan reputasi bank guna meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat dalam menempatkan dana.

5. Strategi Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit diarahkan pada percepatan proses dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, peningkatan kapasitas marketing, inovasi produk, serta perluasan pasar melalui berbagai media dan pendekatan langsung ke masyarakat.

6. Penyelesaian Permasalahan dan Pengendalian Risiko Kredit

Bank menekankan pentingnya analisa kredit yang cermat, monitoring pasca pencairan, pengelolaan agunan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan pengendalian risiko untuk meminimalisir kredit bermasalah.

7. Pemenuhan Ketentuan dan Regulasi

Bank berupaya memastikan kepatuhan penuh terhadap seluruh regulasi, termasuk tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Lainnya, penguatan fungsi kepatuhan, serta penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur dan sistem operasional secara berkelanjutan.

**PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI
PT BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI**

Nama BPR : PT. BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI

Posisi Laporan : 2025

Informasi mengenai penggunaan teknologi informasi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan penyelenggara jasa Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung operasional dan pengembangan layanan, BPR melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa teknologi Informasi yaitu PT Fokus Solusi Utama yang beralamat di Jl Garageh Mandiingin, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kerjasama ini mencakup :

- Penyediaan Core Banking System (Based Integrated System / BIS)
- Layanan maintenance, support, dan update sistem secara berkala
- Penyediaan layanan keamanan sistem

Kerjasama dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang mengatur :

- Ruang lingkup layanan (SLA – Service Level Agreement)
- Kerahasiaan data nasabah
- Standar keamanan informasi
- Tanggung jawab masing masing pihak.

Seluruh kerja sama mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Sistem yang digunakan dalam mendukung pengembangan produk dan Layanan BPR

Dalam mendukung kegiatan usaha, BPR menggunakan sistem teknologi informasi utama berupa Core Banking System (BIS) yang terintegrasi.

Sistem tersebut digunakan untuk:

- Pengelolaan transaksi simpanan dan kredit
- Pengolahan data nasabah secara terpusat
- Penyusunan laporan keuangan internal dan pelaporan pihak eksternal (regulator)
- Membantu dalam pengambilan keputusan

Dengan penggunaan sistem ini, BPR memperoleh manfaat:

- Peningkatan kecepatan dan akurasi transaksi
- Integrasi data antar unit kerja
- Kemudahan dalam pengembangan layanan berbasis teknologi

3. Upaya digitalisasi dalam kegiatan operasional BPR

Dalam pelaksanaan operasional saat ini, PT BPR Putra Mahkota Mandiri masih berada pada tahap awal digitalisasi. Implementasi teknologi informasi yang digunakan meliputi:

- Penggunaan Core Banking System berbasis Based Integrated System (BIS) sebagai sistem utama dalam pengelolaan transaksi dan data nasabah
- Pemanfaatan email resmi perusahaan sebagai sarana komunikasi internal dan eksternal
- Penggunaan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp untuk koordinasi operasional secara terbatas

Digitalisasi yang dilakukan masih bersifat dasar dan difokuskan pada:

- Mendukung kelancaran operasional harian
- Mempercepat komunikasi antar unit kerja
- Meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data melalui sistem core banking

Ke depan, BPR berencana untuk melakukan pengembangan digitalisasi secara bertahap, antara lain:

- Pengembangan sistem pendukung operasional berbasis aplikasi
- Integrasi sistem untuk meningkatkan efisiensi dan kontrol operasional

4. Upaya pengamanan dalam penyelenggaraan teknologi Informasi

Dalam menjaga keamanan informasi, BPR menerapkan berbagai langkah pengamanan yang mencakup aspek sistem, infrastruktur, dan prosedur sebagai berikut:

a. Keamanan Sistem

- Penggunaan antivirus dan firewall
- Update sistem dan patch keamanan secara berkala
- Penerapan kontrol akses pengguna (user access control)

b. Keamanan Infrastruktur

- Pengamanan ruang server dengan akses terbatas
- Penggunaan log book akses ruang server
- Pemasangan perangkat pendukung seperti CCTV

c. Keamanan Data

- Pelaksanaan backup data secara rutin (harian/mingguan)
- Penyimpanan backup di lokasi terpisah (offsite)
- Monitoring aktivitas sistem secara berkala

d. Kebijakan dan Prosedur

- Penyusunan dan penerapan SOP teknologi informasi
- Pelaksanaan audit internal secara berkala
- Peningkatan kesadaran keamanan informasi melalui pelatihan karyawan

PERKEMBANGAN USAHA & TARGET PASAR

Nama BPR : PT. BPR Putra Mahkota Mandiri

Posisi Laporan : 2025

Informasi mengenai perkembangan usaha dan target pasar pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana

Pada tahun 2025, penghimpunan dana sesuai dengan target bank yang telah disampaikan kepada OJK lebih difokuskan pada peningkatan dana dalam bentuk tabungan, karena dinilai sebagai dana yang lebih murah dibandingkan deposito. Selain itu, dalam RBB (Rencana Bisnis Bank), bank juga merencanakan perekrutan tenaga funding officer dalam rangka meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK), menurunkan rasio LDR, serta meningkatkan likuiditas bank.

Namun, pada realisasinya bank belum mampu meningkatkan DPK secara optimal, baik dari sisi tabungan maupun deposito. Meskipun demikian, bank tetap berkomitmen untuk terus menggiatkan literasi dan inklusi produk bank, baik secara tatap muka maupun melalui media sosial, guna mendukung peningkatan penghimpunan dana ke depannya.

2. Penyaluran kredit

Pada tahun 2025, penyaluran dana bank masih berfokus pada sektor ekonomi dan jenis penggunaan kredit yang sama seperti periode sebelumnya, dengan kegiatan ekspansi yang juga masih dilakukan di wilayah operasional yang sama. Pola penyaluran kredit belum mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, pada pertengahan tahun terjadi kendala pada bagian pemasaran kredit (marketing) akibat pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa tenaga marketing, sehingga menimbulkan kekosongan posisi yang berdampak langsung pada aktivitas pemasaran dan penyaluran kredit. Kekosongan ini menyebabkan proses pengajuan dan realisasi kredit menjadi tidak optimal karena tidak ada tenaga yang secara maksimal melakukan pengembangan dan penyaluran nasabah baru.

Untuk mengatasi hal tersebut, bank kemudian melakukan rekrutmen tenaga marketing baru. Akan tetapi, tenaga marketing yang baru membutuhkan waktu untuk proses adaptasi, pemahaman wilayah kerja, serta penyesuaian terhadap sistem dan target bank. Kondisi ini menyebabkan aktivitas penyaluran kredit belum dapat kembali berjalan secara optimal dalam waktu singkat sehingga realisasi penyaluran kredit pada tahun 2025 menjadi terbatas dan pertumbuhan kredit bank tidak menunjukkan peningkatan, bahkan cenderung stagnan dibandingkan tahun sebelumnya.



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PUTRA MAHKOTA MANDIRI
Selalu ada pada saat dibutuhkan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Nama BPR : PT. BPR Putra Mahkota Mandiri

Posisi Laporan : 2025

Sesuai POJK nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, dengan ini Direksi PT. BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab dalam penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan tahunan ini. Untuk itu telah ditunjuk seorang penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengendalian yang dilakukan adalah memastikan laporan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
2. Data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan BPR tahun 2025 adalah benar dan telah diaudit oleh Akuntan Publik **Griselda, Wisnu & Arum** dari Kantor Akuntan Publik **Certified Public Accountants**
3. Seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan 2025 adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
4. Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan tahun 2025 dinilai cukup efektif dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 April 2026

PT. Bank Perekonomian Rakyat

PUTRA MAHKOTA MANDIRI


Yuni Wulandari, SE
Direktur Utama

Syarif, S.Sos

Direktur



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00022/3.0249/AU.8/07/0205-1/1/IV/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BPR Putra Mahkota Mandiri
Kota Pekanbaru

Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT BPR Putra Mahkota Mandiri** yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia.

Basis Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami menarik perhatian Saudara ke Catatan 5 tentang "Kredit Yang Diberikan" dan Catatan 15 tentang "Pendapatan Bunga" atas laporan keuangan, Perusahaan masih mengakui provisi dan biaya transaksi dengan metode garis lurus dan belum menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dipersyaratkan oleh Bab 11 Instrumen Keuangan Dasar dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Selain yang tersebut di atas, kami menarik perhatian saudara ke Catatan 13 tentang "Liabilitas Lainnya" pada akun "Cadangan Imbalan Pascakerja" sebesar Rp73.225.000,- Perusahaan belum melakukan perhitungan, pengakuan, dan pencatatan kewajiban Imbalan Pascakerja sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Head Office :
Izin No. 1034/KM.1/2010
Kom. Perkantoran Harmoni Mas
Jl. Garuda No. 80 N
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620
Telp. (021) 4206833/ (021) 4206443
Email : kapgwa_jkt@yahoo.co.id

Branch Office :
Izin No. 685/KM.1/2012
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 50 A
Pekanbaru, Riau 28122
HP. 0823 9106 8033
Telp. (0761) 45200
Email : kapgwa_pku@yahoo.co.id
pekanbaru@kapgwa.id

Branch Office :
Izin No. 109/KM.1/2022
Mega Legenda 2 Blok A1 No.03
Kel. Balai Permai, Kec. Batam Kota,
Batam - Kepulauan Riau 29431
Telp : 0778 5508021
Email : admin@kapgwabatang.com

Branch Office :
Izin No 675/KM.1/2022
Jl. Jatibening II No.2 Kav.6
Kel. Jatibening Baru, Kec. Pdk Gede
Bekasi, Jawa Barat, 17412
Telp. 021 855 24157
Email : kapgwa_bks@yahoo.com

Branch Office :
Izin No. 132/KM.1/2019
Panin Tower Lantai 8,
Jl. Jend Sudirman No 7, Klandasan Ilir,
Balikpapan, Kalimantan Timur 76113
Telp : 0542-886-3399
Email : kapgriselda.naekringo1969@gmail.com

Website : www.kapgwa.id



Nomor: 00022/3.0249/AU.8/07/0205-1/1/IV/2026 (lanjutan)

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdapat penyajian "Kenaikan (penurunan) atas aset dan/atau liabilitas lainnya" masing-masing sebesar (Rp392.478.519,-) dan (Rp436.783.861,-) Hal tersebut disajikan sebagai bagian dari rekonsiliasi arus kas dari aktivitas operasi yang belum ditentukan klasifikasi atas transaksi pada Laporan Arus Kas.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal ini.

Hal Lain

Laporan keuangan **PT BPR Putra Mahkota Mandiri** untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 06 Maret 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Head Office :

Izin No. 1034/KM.1/2010
Kom. Perkantoran Harmoni Mas
Jl. Garuda No. 80 N
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620
Telp. (021) 4206833/ (021) 4206443
Email : kapgwa_jkt@yahoo.co.id

Branch Office :

Izin No. 685/KM.1/2012
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 50 A
Pekanbaru, Riau 28122
HP. 0823 9106 8033
Telp. (0761) 45200
Email : kapgwa_pku@yahoo.co.id
pekanbaru@kapgwa.id

Branch Office :

Izin No. 109/KM.1/2022
Mega Legenda 2 Blok A1 No.03
Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota,
Batam - Kepulauan Riau 29431
Telp : 0778 5508021
Email : admin@kapgwabatam.co.id

Branch Office :

Izin No 675/KM.1/2022
Jl. Jatibening II No.2 Kav.6
Kel. Jatibening Baru, Kec. Pdk Gede
Bekasi, Jawa Barat, 17412
Telp. 021 855 24157
Email : kapgwa_bks@yahoo.com

Branch Office :

Izin No. 132/KM.1/2019
Panin Tower Lantai 8,
Jl. Jend Sudirman No 7, Klandasan Ilir,
Balikpapan, Kalimantan Timur 76113
Telp : 0542-886-3399
Email : kapgriselda.naekringo1969@gmail.com

Website : www.kapgwa.id



Nomor: 00022/3.0249/AU.8/07/0205-1/1/IV/2026 (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Head Office :

Izin No. 1034/KM.1/2010
Kom. Perkantoran Harmoni Mas
Jl. Garuda No. 80 N
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620
Telp. (021) 4206833/ (021) 4206443
Email : kapgwa_jkt@yahoo.co.id

Branch Office :

Izin No. 685/KM.1/2012
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 50 A
Pekanbaru, Riau 28122
HP. 0823 9106 8033
Telp. (0761) 45200
Email : kapgwa_pku@yahoo.co.id
pekanbaru@kapgwa.id

Branch Office :

Izin No. 109/KM.1/2022
Mega Legenda 2 Blok A1 No.03
Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota,
Batam - Kepulauan Riau 29431
Telp : 0778 5508021
Email : admin@kapgwabatam.co.id

Branch Office :

Izin No 675/KM.1/2022
Jl. Jatibening II No.2 Kav.6
Kel. Jatibening Baru, Kec. Pdk Gede
Bekasi, Jawa Barat, 17412
Telp. 021 855 24157
Email : kapgwa_bks@yahoo.com

Branch Office :

Izin No. 132/KM.1/2019
Panin Tower Lantai 8,
Jl. Jend Sudirman No 7, Klandasan Ilir,
Balikpapan, Kalimantan Timur 76113
Telp : 0542-886-3399
Email : kapgriselda.naekringo1969@gmail.com

Website : www.kapgwa.id



GRISELDA, WISNU & ARUM
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS



STT Kantor Akuntan Publik Asing No. S-476/MK.1/2012
STT Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 168/STT/III/2011, No. 333/STT/X/2018
STT Otoritas Jasa Keuangan - Pasar Modal - Bank - IKNB

Nomor: 00022/3.0249/AU.8/07/0205-1/1/IV/2026 (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.



Alchudri, SE., MM., CPA., CA., CFI

No. Reg. AP. 0205

Pekanbaru, 10 April 2026

Head Office :

Izin No. 1034/KM.1/2010
Kom. Perkantoran Harmoni Mas
Jl. Garuda No. 80 N
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620
Telp. (021) 4206833/ (021) 4206443
Email : kapgwa_jkt@yahoo.co.id

Branch Office :

Izin No. 685/KM.1/2012
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 50 A
Pekanbaru, Riau 28122
HP. 0823 9106 8033
Telp. (0761) 45200
Email : kapgwa_pku@yahoo.co.id
pekanbaru@kapgwa.id

Branch Office :

Izin No. 109/KM.1/2022
Mega Legenda 2 Blok A1 No.03
Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota,
Batam - Kepulauan Riau 29431
Telp : 0778 5508021
Email : admin@kapgwabatang.co.id

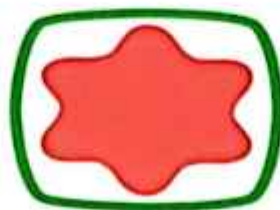
Branch Office :

Izin No 675/KM.1/2022
Jl. Jatibening II No.2 Kav.6
Kel. Jatibening Baru, Kec. Pdk Gede
Bekasi, Jawa Barat, 17412
Telp. 021 855 24157
Email : kapgwa_bks@yahoo.com

Branch Office :

Izin No. 132/KM.1/2019
Panin Tower Lantai 8,
Jl. Jend Sudirman No 7, Klandasan Ilir,
Balikpapan, Kalimantan Timur 76113
Telp : 0542-886-3399
Email : kapgriselda.naekringo1969@gmail.com

Website : www.kapgwa.id



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2025

Jl. Jendral Sudirman Komp. Bissines Park no.7 Pekanbaru -Riau

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2025

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Posisi Keuangan.....	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 30
Laporan Auditor Independen	



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PUTRA MAHKOTA MANDIRI
Selalu ada pada saat dibutuhkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
PT BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI**

Nomor : 098/B/Dir-BPR/PMM-PKU/IV/2026

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yuni Wulandari Putri, S.E.,Ak
Jabatan : Direktur Utama

Untuk dan atas nama PT BPR Putra Mahkota Mandiri menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT BPR Putra Mahkota Mandiri;
2. Laporan Keuangan PT BPR Putra Mahkota Mandiri tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR Putra Mahkota Mandiri telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT BPR Putra Mahkota Mandiri tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT BPR Putra Mahkota Mandiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi BPR Putra Mahkota Mandiri.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 10 April 2026



Yuni Wulandari Putri, S.E.,Ak
Direktur Utama

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PER 31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Kas	2d,3	77.789.400	42.670.600
Penempatan pada bank lain	2f,4	5.179.784.845	4.420.394.049
Kredit yang diberikan	2g,5	13.290.377.783	13.585.270.440
Aset tetap - bersih	2j,6	46.911.728	47.441.555
Aset lain-lain - bersih	2l,8	505.600.347	542.970.030
JUMLAH ASET		19.100.464.103	18.638.746.674
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	2m,9	24.264.813	58.009.223
Utang bunga	2n,10	24.841.564	26.940.421
Utang pajak	2o,23	17.475.918	44.989.986
Simpanan	2p,11	9.516.924.779	9.659.207.565
Simpanan dari bank lain	2p,12	1.300.000.000	1.750.000.000
Liabilitas lain-lain	2q,13	151.475.709	106.043.667
JUMLAH LIABILITAS		11.034.982.783	11.645.190.862
EKUITAS			
Modal saham	2v,14	6.000.000.000	6.000.000.000
Cadangan umum	2w,14	219.100.382	167.100.382
Saldo laba	2w,14	1.846.380.938	826.455.430
JUMLAH EKUITAS		8.065.481.320	6.993.555.812
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		19.100.464.103	18.638.746.674

Pekanbaru, 10 April 2026

Disetujui,



Yuni Wulandari Putri, S.E,Ak
Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pendapatan dan beban operasional			
Pendapatan operasional			
Pendapatan bunga	2s,15	3.123.672.519	2.922.843.373
Pendapatan lainnya	2s,16	144.501.503	40.696.730
Jumlah pendapatan operasional		3.268.174.022	2.963.540.103
Beban operasional			
Beban bunga	2s,17	642.512.684	625.837.566
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	2s,18	247.273.552	81.486.080
Beban pemasaran	2s,19	3.677.000	2.768.500
Beban administrasi dan umum	2s,20	1.826.853.122	1.693.953.137
Jumlah beban operasional		2.720.316.358	2.404.045.283
Laba operasional		547.857.664	559.494.820
Pendapatan (beban) non operasional			
Pendapatan non operasional	2s,21	51.578.646	39.197.979
Beban non operasional	2s,22	200.000	300.000
Jumlah pendapatan (beban) non operasional		51.378.646	38.897.979
Laba sebelum pajak		599.236.310	598.392.799
Taksiran pajak penghasilan		70.180.918	74.274.986
Laba tahun berjalan		529.055.391	524.117.813
Penghasilan komprehensif lain			
Total penghasilan komprehensif lain		-	-
Total laba komprehensif tahun berjalan		529.055.391	524.117.813

Pekanbaru, 10 April 2026
 Disetujui,



Yuni Wulandari Putri, S.E., Ak
 Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan
 bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	Modal Saham	Cadangan	Saldo Laba	Jumlah
Saldo per 1 Januari 2024	6.000.000.000	115.091.700	806.354.981	6.921.446.681
Dividen	-		(400.000.000)	(400.000.000)
Tatien dan bonus	-		(52.008.682)	(52.008.682)
Cadangan umum	-	52.008.682	(52.008.682)	-
Laba(rugi) tahun berjalan	-		524.117.813	524.117.813
Saldo 31 Desember 2024	6.000.000.000	167.100.382	826.455.430	6.993.555.812
Penyesuaian EIR/CKPN	-		1.010.870.116	1.010.870.116
Dividen			(416.000.000)	(416.000.000)
Tatien dan bonus			(52.000.000)	(52.000.000)
Cadangan umum		52.000.000	(52.000.000)	-
Laba(rugi) Tahun Berjalan	-		529.055.391	529.055.391
Saldo 31 Desember 2025	6.000.000.000	219.100.382	1.846.380.937	8.065.481.319

Catatan atas laporan keuangan merupakan
 bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan provisi kredit yang diberikan	3.066.250.494	2.713.251.239
Penerimaan bunga dari penempatan pada bank lain	162.323.337	162.234.241
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	144.501.503	40.696.730
Penerimaan pendapatan non-operasional	51.578.646	38.897.979
Pembayaran bunga simpanan nasabah dan bank lain	(642.512.684)	(625.837.566)
Pembayaran beban tenaga kerja	(1.277.050.735)	(1.294.841.953)
Pembayaran beban administrasi dan umum	(379.552.018)	(446.037.376)
Pembayaran pajak penghasilan	(44.989.986)	(27.514.067)
Kenaikan (penurunan) neto kredit yang diberikan	(85.125.346)	(1.592.692.431)
Kenaikan (penurunan) neto simpanan nasabah	142.282.786	(751.989.889)
Kenaikan (penurunan) neto simpanan dari bank lain	(450.000.000)	1.750.000.000
(Kenaikan) penurunan aset lain -lain	37.369.683	(104.547.227)
Kenaikan (penurunan) liabilitas segera	33.744.410	(3.775.107)
Kenaikan (penurunan) liabilitas lain - lain	(45.432.042)	14.308.505
Kenaikan (penurunan) utang pajak	27.514.067	9.181.065
Kenaikan (penurunan) atas aset dan/atau liabilitas lainnya	(392.478.519)	(436.783.861)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	348.423.596	(555.449.718)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap dan inventaris	(19.914.000)	(20.500.000)
Arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas investasi	(19.914.000)	(20.500.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran dividen, tantiem dan bonus karyawan	416.000.000	400.000.000
Arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan	416.000.000	400.000.000
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	744.509.596	(175.949.718)
Kas dan Setara Kas Awal Periode	1.963.064.649	2.139.014.367
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	2.707.574.245	1.963.064.649
Kas dan Setara Kas Terdiri Dari :		
Kas	77.789.400	42.670.600
Giro - ABA	142.796.177	136.314.207
Tabungan ABA	1.536.988.668	1.584.079.842
Deposito - ABA	950.000.000	200.000.000
	2.707.574.245	1.963.064.649

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. INFORMASI UMUM

a. Informasi Umum Perusahaan

PT. Bank Perekonomian Putra Mahkota Mandiri berkedudukan di Kota Pekanbaru. Perusahaan didirikan berdasarkan Akta No. 17, Tanggal 21 April 2014, yang dibuat dihadapan Eka Metarahayu, SH. Notaris di Kota Pekanbaru. Akta pendirian tersebut sudah mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No: AHU-12271.40.10.2014, Tanggal 07 Juli 2014.

PT. Bank Perekonomian Putra Mahkota Mandiri berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman No. 7 D Kompleks Business Park, Kota Pekanbaru. Provinsi Riau.

Maksud dan tujuan didirikan PT Bank Perekonomian Rakyat Putra Mahkota Mandiri ini ialah berusaha dalam bidang Perbankan sebagai Bank Perekonomian Rakyat. Kegiatan usaha yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito Berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan / atau tabungan pada bank lain.

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 52 tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Kevin Ardian, S.E., M.Kn. Notaris di Kota Pekanbaru, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No : AHU-0082429.AH01.02 Tahun 2024 , tanggal 17 Desember 2024.

b. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta No. 52, Tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Kevin Ardian,S.E., M.Kn Notaris di Kota Pekanbaru, susunan pengurus Perusahaan per 17 Desember 2024 dan Seterusnya adalah sebagai berikut :

Dewan Direksi

Direktur Utama : Yuni Wulandari Putri, S.E,Ak
Direktur : Syafril, S.Sos

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Herry Amin
Komisaris : Fatmawati

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku per 1 Januari 2025 menggantikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Pada tanggal 24 Desember 2024 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan - lanjutan

Laporan keuangan Perusahaan terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Perusahaan menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Cerukan (Bank Overdraft) pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Perusahaan melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung.

b. Periode Akuntansi dan Mata Uang Pelaporan Transaksi

Periode akuntansi dimulai pada tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Perusahaan adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional. Semua jumlah transaksi dan saldo akun disajikan dalam Rupiah, kecuali dijelaskan lain.

Untuk transaksi yang menggunakan mata uang asing, akan dilakukan translasi menggunakan kurs tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selisih yang timbul dari proses translasi akan disajikan pada laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs.

Laba atau rugi selisih kurs diukur sebesar selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah sesuai kurs mata uang asing tersebut.

c. Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

- i. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak
 - a. Mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan fellow subsidiaries);
 - b. Memiliki kepemilikan dientitas yang memberikan pengaruh signifikan atas
 - c. Memiliki pengendalian bersama atas entitas.
- ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

c. Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa - lanjutan

- iii. Pihak tersebut adalah joint ventures dimana entitas tersebut merupakan venture;
- iv. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
- v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv); Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v); atau
- vi. Pihak tersebut adalah program imbalan pascakerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Perusahaan menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, isteri, anak atau tanggungannya.

Perusahaan mengungkapkan saldo dan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu jenis dan jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa.

d. Kas

Kas terdiri dari dana yang ada di Perusahaan dan Bank, termasuk investasi yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya serta tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya.

e. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain disajikan sebesar nilai nominal atau nilai saldo bruto, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan. Giro pada bank lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

f. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada Bank lain diklasifikasikan ke dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, serta diukur pada nilai wajar melalui pendapatan non operasional. Tujuan penempatan pada bank lain adalah untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar nilai nominal atau nilai saldo bruto dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, dikurangi dengan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

g. Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kredit pembiayaan dan kredit penerusan (*channeling loan*) dinyatakan sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Perusahaan dan dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi.

h. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Aset Non Produktif

Perusahaan mencatat restrukturisasi kredit bermasalah berdasarkan jenis restrukturisasi. Dalam hal restrukturisasi kredit bermasalah dilakukan dengan modifikasi persyaratan kredit, pengurangan atau pengampunan sebagian saldo kredit, dan/atau kombinasi dari Aset produktif terdiri atas penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis. Aset non-produktif adalah aset bank yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2024 tentang kualitas aset produktif diklasifikasikan dalam 5 (lima) golongan yaitu "Lancar", "Dalam Perhatian Khusus", "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet".

Pengklasifikasian aset sebagai lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Produktif dan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.

Pembentukan penyisihan minimum sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Penyisihan umum, sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, dikecualikan untuk sertifikat Bank Indonesia.
- Penyisihan khusus, sekurang-kurangnya sebesar :
 - a. 3% dari aset yang digolongkan "Dalam Perhatian Khusus" setelah dikurangi nilai agunan;
 - b. 10% dari aset yang digolongkan "Kurang Lancar" setelah dikurangi nilai agunan;
 - c. 50% dari aset yang digolongkan "Diragukan" setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - d. 100% dari aset yang digolongkan "Macet" setelah dikurangi nilai agunan.

Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPKA hanya dilakukan untuk aset produktif saja.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset ditetapkan sebesar :

- a. 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

h. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Aset Non Produktif - lanjutan

- c. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- d. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- e. 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;
- f. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan, surat izin pemakaian, atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang;
- g. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- i. 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat;
- j. 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang; atau
- k. 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

i. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat darisatu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

Alur pembentukan CKPN sebagai berikut:

1. Langkah Pertama: Penilaian Pemenuhan Kriteria Aset Baik

Kriteria aset baik sebagai berikut:

- aset keuangan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
- aset keuangan dijamin oleh LPS; dan / atau
- aset keuangan tidak memiliki tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari dan tidak pernah dilakukan restrukturisasi.

Apabila:

- aset keuangan memenuhi kriteria aset baik, BPR dapat tidak membentuk CKPN atas aset keuangan tersebut;
- aset keuangan tidak memenuhi kriteria aset baik, BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan (Langkah Kedua).

2. Langkah Kedua: Penilaian Signifikansi

BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik. Apabila:

- aset keuangan signifikan, BPR melakukan penilaian terhadap aset keuangan tersebut secara individual (langkah ketiga);
- aset keuangan tidak signifikan, BPR membentuk CKPN secara kolektif.

3. Langkah Ketiga: Penilaian Individu Bukti Objektif Penurunan Nilai

BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik. Apabila:

- BPR melakukan penilaian secara individual terhadap aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik dan signifikan.
- Penilaian dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan.

Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

1. Perhitungan Secara Individual

BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik. Apabila:

- Aset keuangan signifikan, BPR melakukan penilaian terhadap aset keuangan tersebut secara individual (langkah kedua);
- BPR melakukan penilaian secara individual terhadap aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik dan signifikan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

i. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

1. Perhitungan Secara Individual

3. Penilaian dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan. Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai.

2. Perhitungan Secara Kolektif

BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik. Apabila:

1. aset keuangan tidak signifikan, BPR membentuk CKPN secara kolektif.
2. Apabila tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN

j. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan.

Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK EP.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*), berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Aset	Tarif
Inventaris kantor	25%
Kendaraan	12,5%

k. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud terdiri dari perangkat lunak, yang dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi perangkat lunak komputer dan mempersiapkan perangkat lunak tersebut sehingga siap untuk digunakan dikapitalisasi.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Amortisasi diakui dalam laba rugi berjalan berdasarkan masa manfaat ekonomis, yaitu 8 (delapan) tahun, dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

l. Aset Lain-lain

Akun ini merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, dengan cara sistematis sesuai dengan berlalunya waktu secara proporsional.

m. Kewajiban Segera

Kewajiban segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

n. Utang Bunga

Utang bunga merupakan kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Termasuk dalam pengertian kewajiban bunga adalah kewajiban bunga yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

o. Pajak Penghasilan

BPR mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. BPR harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. BPR tidak mengakui adanya pajak

p. Simpanan dari Nasabah dan Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada Perusahaan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam pos ini adalah giro, tabungan, dan deposito.

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dan perolehan simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain.

q. Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain

Beban yang masih harus dibayar terdiri atas beban bunga yang masih harus dibayar, liabilitas terkait dengan nasabah dan asuransi, setoran jaminan, pendapatan diterima dimuka, dan lain-lain.

r. Provisi

Provisi diakui jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, Perusahaan memiliki kewajiban hukum maupun konstruktif yang dapat diestimasi secara andal, dan kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Beban provisi diukur berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada akhir periode pelaporan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

r. Provisi - lanjutan

Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai provisi adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban.

s. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode akrual. Bank mengakui pendapatan bunga atas aset produktif yang diklasifikasikan sebagai "*performing*" (lancar) berdasarkan penerimaan atas dasar kas. Piutang bunga dari kredit yang diklasifikasikan "*non-performing*" dibatalkan dan dibebankan pada tahun berjalan serta baru diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai.

Pendapatan bunga atas aset "*non-performing*" yang belum diterima dicatat dalam tagihan kontinjensi. Penerimaan tunai atas kredit yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit baru diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi.

t. Pendapatan dan Beban Provisi

Pendapatan dan beban atas provisi dan komisi yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif atas aset atau liabilitas keuangan dimasukkan ke dalam perhitungan suku bunga efektif.

Pendapatan provisi yang melebihi jumlah tertentu dan berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan serta berjangka waktu, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai batas jangka waktu kreditnya. Jika tidak terdapat jangka waktu, maka pendapatan provisi langsung diakui pada saat jasa diberikan.

Pendapatan provisi atas komitmen kredit diakui berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) selama jangka waktu komitmen kredit.

Beban provisi dan komisi lainnya yang terutama terkait dengan transaksi antar bank diakui sebagai beban pada saat jasa tersebut diterima.

u. Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen.

Imbalan kerja yang diberikan oleh Perusahaan mencakup:

a. Program Iuran Pasti

Perusahaan menyelenggarakan program iuran pasti untuk karyawan tetap melalui BPJS Ketenagakerjaan.

- Iuran diakui sebagai beban pada periode saat karyawan memberikan jasanya.
- Kewajiban Perusahaan hanya terbatas pada jumlah iuran yang disepakati.
- Iuran yang belum dibayar pada akhir periode dicatat sebagai utang imbalan kerja.

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

u. Imbalan Kerja - lanjutan

b. Program Imbalan Pasti

Perusahaan memiliki kewajiban imbalan pasti yang timbul sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah ditetapkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Sebagaimana diatur dalam PP No. 35/2021, program imbalan pasti mencakup antara lain: (a) uang pesangon, (b) uang penghargaan masa kerja, dan (c) penggantian hak.

v. Ekuitas

Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa dan akun Tambahan Modal Disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

w. Saldo Laba

Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Akun ini dinyatakan terpisah dari akun Modal Saham. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya: dicadangkan untuk perluasan pabrik atau untuk memenuhi ketentuan regulasi maupun ikatan tertentu.

Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi periode berjalan. Pengungkapan saldo laba meliputi:

- i. Pengungkapan penjabaran (apropriasi) dan pemisahan saldo laba, menjelaskan jenis penjabaran dan pemisahan, tujuan penjabaran dan pemisahan saldo laba, serta jumlahnya. Perubahan akun-akun penjabaran atau pemisahan saldo laba, juga diungkapkan;
- ii. Peraturan, perikatan, batasan, dan jumlah batasan di sekitar saldo laba, diungkapkan;
- iii. Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak.

x. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

3. Kas

	2025	2024
Kas khasanah kantor	77.789.400	42.670.600
Jumlah	77.789.400	42.670.600

4. Penempatan Pada Bank Lain

	2025	2024
Giro Bank		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	142.796.177	136.314.207
Jumlah	142.796.177	136.314.207
Tabungan Umum		
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	721.115.626	851.347.981
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	361.447.683	135.415.741
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	284.296.076	183.338.605
PT BPR Harta Mandiri	74.286.576	-
PT Bank Permata Syariah	48.321.855	47.752.719
PT BPR Payung Negeri Bestari	47.520.852	366.224.796
Jumlah	1.536.988.668	1.584.079.842
Deposito		
Deposito > 1 Bulan - 3 Bulan		
PERUMDA BPR Rokan Hulu	300.000.000	-
PT BPR Delta Dana Mandiri	250.000.000	-
PT BPR Syariah Hasanah	200.000.000	200.000.000
PT BPR Payung Negeri Bestari	200.000.000	-
Jumlah	950.000.000	200.000.000
Deposito > 3 Bulan		
PT BPR Duta Perdana	550.000.000	300.000.000
PT BPR Dana Amanah	500.000.000	600.000.000
PT BPR Arsham Sejahtera	500.000.000	300.000.000
PT BPR Pekanbaru Madani Perseroda	400.000.000	450.000.000
PT BPR Payung Negeri Bestari	250.000.000	500.000.000
PT BPR Syariah Hasanah	250.000.000	-
PT BPR Mandiri Jaya Perkasa	100.000.000	100.000.000
PT BPR Universal Karya Mandiri Riau	-	250.000.000
Jumlah	2.550.000.000	2.500.000.000
Jumlah	5.179.784.845	4.420.394.049

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

5. Kredit Yang Diberikan

	2025	2024
Berdasarkan Keterkaitan		
Pihak terkait	163.134.807	129.861.123
Pihak tidak terkait	14.038.455.687	13.986.604.025
Jumlah	14.201.590.494	14.116.465.148
Berdasarkan Jenis Kredit		
Kredit modal kerja	5.692.467.895	6.473.464.509
Kredit investasi	1.269.745.431	1.305.325.606
Kredit konsumsi	7.239.377.168	6.337.675.033
Jumlah	14.201.590.494	14.116.465.148
Berdasarkan Kolektibilitas		
Kredit lancar	10.612.655.757	9.846.323.523
Kredit dalam perhatian khusus	2.206.337.030	3.480.962.403
Kredit kurang lancar	331.214.913	119.687.504
Kredit diragukan	393.729.660	311.058.342
Kredit macet	657.653.134	358.433.376
Jumlah	14.201.590.494	14.116.465.148
Jumlah	14.201.590.494	14.116.465.148
Transaksi yang belum diamortisasi:		
Provisi dan beban administrasi	(237.937.877)	(272.653.446)
Jumlah	(237.937.877)	(272.653.446)
Jumlah	13.963.652.617	13.843.811.702
Cadangan kerugian penurunan nilai	(673.274.834)	(258.541.262)
Jumlah	13.290.377.783	13.585.270.440

6. Aset Tetap

	2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
Harga Perolehan:				
Inventaris	303.089.500	19.914.000	-	323.003.500
Kendaraan	216.739.000	-	-	216.739.000
Lainnya	176.437.400	-	-	176.437.400
	696.265.900	19.914.000	-	716.179.900

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)

6. Aset Tetap

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
2025				
Akumulasi Penyusutan:				
Inventaris	277.725.418	12.028.854	-	289.754.272
Kendaraan	202.127.225	5.009.750	-	207.136.975
Lainnya	168.971.701	3.405.224	-	172.376.925
Jumlah	648.824.344	20.443.828	-	669.268.172
Nilai Buku	47.441.556			46.911.728

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
2024				
Akumulasi Penyusutan:				
Inventaris	303.089.500	-	-	303.089.500
Kendaraan	216.739.000	-	-	216.739.000
Lainnya	176.437.400	-	-	176.437.400
Jumlah	696.265.900	-	-	696.265.900
Akumulasi Penyusutan:				
Inventaris	277.725.418	-	-	277.725.418
Kendaraan	202.127.225	-	-	202.127.225
Lainnya	168.971.701	-	-	168.971.701
Jumlah	648.824.344	-	-	648.824.344
Nilai Buku	47.441.556			47.441.555

7. Aset Tak Berwujud

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
2024				
Harga Perolehan:				
Inventaris	20.000.000	-	-	20.000.000
Kendaraan	20.000.000	-	-	20.000.000
Lainnya	20.000.000	-	-	20.000.000
Jumlah	60.000.000	-	-	60.000.000
Akumulasi Amortisasi:				
Inventaris	20.000.000	-	-	20.000.000
Kendaraan	20.000.000	-	-	20.000.000
Lainnya	20.000.000	-	-	20.000.000
Jumlah	60.000.000	-	-	60.000.000
Nilai Buku	-			-

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

8. Aset Lain-Lain

	2025	2024
Pendapatan diterima dimuka kredit	343.647.182	313.309.786
Biaya dibayar dimuka	126.426.051	179.569.312
Renovasi gedung	19.904.187	34.832.327
Pendapatan diterima dimuka ABA	8.301.713	8.220.205
Persediaan	7.321.214	7.038.400
Jumlah	505.600.347	542.970.030

9. Liabilitas Segera

	2025	2024
Pajak		
Pajak tabungan dan deposito	7.235.651	9.090.121
PPH pasal 25	4.000.000	4.785.000
PPH pasal 21	3.464.162	2.117.912
Jumlah	14.699.813	15.993.033
Lainnya		
Titipan nasabah	9.565.000	42.016.190
Jumlah	9.565.000	42.016.190
Jumlah	24.264.813	58.009.223

10. Utang Bunga

	2025	2024
Deposito Belum Jatuh Tempo		
Accrual deposito	20.711.427	21.577.407
Jumlah	20.711.427	21.577.407
Simpanan Dari Bank Lain Belum Jatuh Tempo		
Accrual deposito antar bank	4.130.137	5.363.014
Jumlah	4.130.137	5.363.014
Jumlah	24.841.564	26.940.421

11. Simpanan

	2025	2024
Tabungan		
Tabungan umum	1.145.164.210	1.538.697.651
Tabungan tampan	355.264.075	321.333.420
Tabungan tandika	104.496.494	82.176.494
Jumlah	1.604.924.779	1.942.207.565

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

11. Simpanan

	2025	2024
Deposito berjangka		
Deposito 1 Bulan	50.000.000	50.000.000
Deposito 3 Bulan	7.850.000.000	7.655.000.000
Deposito 6 Bulan	12.000.000	12.000.000
Jumlah	7.912.000.000	7.717.000.000
Jumlah	9.516.924.779	9.659.207.565

12. Simpanan Dari Bank Lain

	2025	2024
Deposito		
Deposito > 1 Bulan - 3 Bulan		
PT BPR Indra Candra	1.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah	1.000.000.000	1.000.000.000
Deposito > 3 Bulan		
PT BPR Anugrah Bintang Sejahtera	300.000.000	-
PT BPR Arsham Sejahtera	-	500.000.000
PT BPR Pekanbaru Madani	-	250.000.000
Jumlah	300.000.000	750.000.000
Jumlah	1.300.000.000	1.750.000.000

13. Liabilitas Lainnya

	2025	2024
Cadangan imbalan pasca kerja	73.225.000	53.200.000
Cadangan THR	36.500.000	36.000.000
Cadangan pendidikan	26.665.390	3.977.150
Cadangan insentif	15.085.319	12.866.517
Jumlah	151.475.709	106.043.667

14. Ekuitas

	2025	2024
I. Modal Saham		
Modal dasar	10.000.000.000	10.000.000.000
Modal belum disetor	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)
Jumlah	6.000.000.000	6.000.000.000

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

14. Ekuitas

i. Modal Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Nilai Nominal
Herry Amin	3.600	60,00%	3.600.000.000
Fatmawati	1.200	20,00%	1.200.000.000
Alexander	600	10,00%	600.000.000
Erick Caesarrani Asmara	600	10,00%	600.000.000
		100,00%	6.000.000.000

2025

2024

ii. Cadangan Umum

Cadangan umum	219.100.382	167.100.382
Jumlah	219.100.382	167.100.382

iii. Saldo Laba

Laba(rugi) tahun-tahun lalu	826.455.430	806.354.981
Penyesuaian EIR/CKPN	1.010.870.116	-
Dividen	(416.000.000)	(400.000.000)
Tantiem dan bonus	(52.000.000)	(52.008.682)
Cadangan umum	(52.000.000)	(52.008.682)
Laba/rugi tahun berjalan	529.055.391	524.117.813
Jumlah	1.846.380.938	826.455.430

15. Pendapatan Bunga

Penempatan Pada Bank Lain

	2025	2024
Deposito	150.247.057	151.073.862
Tabungan	10.961.198	10.089.900
Giro	1.115.082	1.070.479
Jumlah	162.323.337	162.234.241

Kredit Yang Diberikan

Kepada pihak ketiga bukan bank	2.779.479.279	2.601.920.976
Jumlah	2.779.479.279	2.601.920.976

Provisi Kredit

Kepada pihak ketiga bukan bank	181.869.903	158.688.156
Jumlah	181.869.903	158.688.156
Jumlah	3.123.672.519	2.922.843.373

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

16. Pendapatan Lainnya

	2025	2024
Pemulihan CKPN	100.510.433	1.740.644
Denda kredit	28.889.376	20.666.498
Pendapatan ADM tabungan	7.142.889	5.268.858
Pendapatan biaya survei	3.875.000	9.000.000
Pendapatan jasa transaksi	1.500.000	1.441.609
Pergantian biaya asuransi tabungan	1.350.300	1.233.000
Pendapatan ADM tutup rekening tabungan	1.063.605	939.546
Pendapatan finalti deposito	85.000	351.375
Pendapatan ADM Jaminan	45.000	30.000
Penggantian buku tabungan	39.900	25.200
Jumlah	144.501.503	40.696.730

17. Beban Bunga

	2025	2024
Beban Bunga Kontraktual		
Tabungan		
Beban bunga tabungan	30.742.588	43.369.275
Jumlah	30.742.588	43.369.275
Deposito		
Beban bunga deposito	491.395.748	523.140.012
Jumlah	491.395.748	523.140.012
Simpanan dari Bank Lain		
Beban bunga deposito ABP	97.620.891	39.113.013
Jumlah	97.620.891	39.113.013
Lainnya		
Beban premi penjaminan simpanan LPS	22.753.457	20.215.266
Jumlah	22.753.457	20.215.266
Jumlah	642.512.684	625.837.566

18. Beban CKPN

	2025	2024
Kredit Yang Diberikan		
Kepada pihak ketiga bukan bank	247.273.552	81.486.080
Jumlah	247.273.552	81.486.080

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

19. Beban Pemasaran

	2025	2024
Beban promosi dan marketing	2.820.000	1.780.500
Beban edukasi dan inklusi perbankan	857.000	988.000
Jumlah	3.677.000	2.768.500

20. Beban Administrasi Dan Umum

	2025	2024
Beban Tenaga Kerja		
Beban gaji dan upah	1.033.001.235	981.470.958
Honorarium	186.000.000	162.000.000
Lainnya	150.443.302	109.170.845
Jumlah	1.369.444.537	1.252.641.803
Beban Pendidikan dan Pelatihan		
Beban pendidikan	57.412.740	42.200.150
Jumlah	57.412.740	42.200.150
Beban Sewa		
Gedung kantor	55.000.000	53.333.335
Jumlah	55.000.000	53.333.335
Beban Peny. / Penghapusan ATI		
Beban penyusutan inventaris	12.028.854	13.773.885
Beban penyusutan lainnya	5.009.748	5.951.003
Beban penyusutan kendaraan	3.405.225	17.303.501
Jumlah	20.443.827	37.028.389
Beban Premi Asuransi		
Beban premi asuransi mobil	5.273.635	5.282.937
Premi asuransi cash in save dan transit	1.590.000	1.623.750
Premi asuransi	1.150.982	2.894.101
Beban premi fire inventaris	632.102	477.198
Beban premi asuransi motor	404.353	268.457
Jumlah	9.051.072	10.546.443

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

20. Beban Administrasi Dan Umum

	2025	2024
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
Beban maintenance program BIS	17.200.000	7.200.000
Beban pemeliharaan mobil	16.643.519	8.741.700
Beban pemeliharaan inventaris	3.286.000	7.555.000
Beban pemeliharaan mesin genset	1.165.000	1.240.000
Beban pemeliharaan motor	815.000	452.500
Beban pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	300.000	-
Jumlah	39.409.519	25.189.200
Beban Barang dan Jasa		
Beban kantor pengacara	42.000.000	21.000.000
Barang dan jasa lainnya	26.925.760	18.665.952
Beban listrik	26.107.566	25.190.616
Beban BBM mobil dan motor kantor	22.290.000	20.024.190
Beban kantor akuntan publik	17.445.670	24.525.000
Beban telepon	12.640.108	11.775.144
Beban asosiasi BPR	12.000.432	12.000.432
Beban BBM dan service motor marketing	11.350.000	12.300.000
Beban alat tulis kantor	10.721.400	11.739.300
Beban rumah tangga	9.774.206	10.244.042
Beban perjalanan dinas	8.325.000	8.011.000
Beban tagihan VPN dan Website	7.153.865	5.310.000
Beban barang cetakan	6.335.586	8.687.875
Beban jamuan tamu dan rapat	6.251.900	5.700.500
Beban langganan majalah/koran	6.200.000	3.500.000
Beban BBM genset	1.316.500	1.748.000
Beban pemakaian kendaraan karyawan	1.265.000	1.325.000
Beban pos dan ekspedisi	587.500	444.000
Beban meterai	520.000	810.000
Beban kebersihan dan jaga malam	520.000	1.800.000
Beban fotocopy	330.500	336.550
Beban transfer	65.300	74.300
Jumlah	230.126.293	205.211.901
Beban Pajak		
Beban pajak PBB	3.363.761	3.366.261
Beban pajak mobil	2.362.552	2.396.510
Beban pajak reklame	1.519.000	2.284.500
<i>(Sub jumlah pindah ke halaman selanjutnya)</i>	7.245.313	8.047.271

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

20. Beban Administrasi Dan Umum

	2025	2024
Beban Pajak		
<i>(Sub jumlah pindah dari halaman sebelumnya)</i>	7.245.313	8.047.271
Beban pajak motor kantor	218.197	-
Beban pajak jasa	-	450.000
Beban pajak sewa	-	16.500.000
Jumlah	7.463.510	24.997.271
Beban Lainnya		
Beban renovasi dan relokasi gedung	17.904.140	17.469.807
Beban iuran OJK	10.180.000	10.060.000
Beban insentif tenaga pemasaran	3.891.963	3.324.338
Beban urusan pengadilan	2.376.000	-
Beban notaris	-	2.250.000
Beban olahraga	1.807.521	722.000
Beban fee kredit sindikasi	1.500.000	8.250.000
Beban administrasi antar bank	842.000	728.500
Jumlah	38.501.624	42.804.645
Jumlah	1.826.853.122	1.693.953.137

21. Pendapatan Non Operasional

	2025	2024
Pendapatan fee asuransi	26.542.549	15.490.379
Pendapatan fee notaris	22.175.550	23.702.500
Pendapatan non operasional lainnya	2.860.547	5.100
Jumlah	51.578.646	39.197.979

22. Beban Non Operasional

	2025	2024
Sumbangan	200.000	300.000
Jumlah	200.000	300.000

23. Perpajakan

	2025	2024
i. Utang Pajak		
PPh Pasal 29	17.475.918	44.989.986
Jumlah	17.475.918	44.989.986

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

23. Perpajakan

	2025	2024
ii. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan		
Laba Sebelum Pajak	599.236.310	598.392.799
<u>Koreksi Fiskal Positif:</u>		
Cadangan THR	85.000.000	-
Cadangan pendidikan	54.662.740	-
Cadangan insentif	24.318.802	-
Cadangan imbalan pasca kerja	24.000.000	24.000.000
Beban olahraga	1.807.521	722.000
Beban sumbangan	200.000	300.000
Provisi	-	25.062.895
Beban transaksi	-	21.048.949
Beban Jamuan	-	5.700.500
<u>Koreksi Fiskal Negatif:</u>		
Realisasi THR	84.500.000	-
Realisasi pendidikan	31.974.500	-
Realisasi insentif	22.100.000	-
Pendapatan bunga tabungan	7.552.441	-
Realisasi imbalan pasca kerja	3.975.000	-
Pendapatan jasa giro bank	1.115.082	-
Jumlah	38.772.040	76.834.344
Laba Kena Pajak Setelah Koreksi Fiskal	638.008.350	675.227.143
Pajak Penghasilan Terutang	70.180.918	74.274.986
Kredit Pajak		
PPH Pasal 25	52.705.000	29.285.000
PPH Badan Kurang (Lebih) Bayar	17.475.918	44.989.986
iii. Beban Pajak Penghasilan		
Pajak penghasilan non final	70.180.918	74.274.986
	70.180.918	74.274.986

24. Risiko Likuiditas

i. Loan Deposit Ratio :

	2025	
	Jumlah	Persentase
Tabungan	1.604.924.779	16,86%
Deposito berjangka	7.912.000.000	83,14%
Jumlah Dana	9.516.924.779	100,00%

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

24. Risiko Likuiditas - lanjutan

i. Loan Deposit Ratio :

Aset Produktif	9.516.924.779	100,00%
Kredit yang diberikan	14.201.590.494	
Loan to Deposit Ratio (LDR)	149,22%	

ii. Cash Ratio :

	2025	
	Jumlah	Persentase
Aset Likuid		
Kas	77.789.400	4,43%
Giro pada bank lain	142.796.177	8,12%
Tabungan pada bank lain	1.536.988.668	87,45%
Jumlah Aset Likuid	1.757.574.245	100,00%

ii. Cash Ratio :

	2025	
	Jumlah	Persentase
Liabilitas Lancar		
Liabilitas segera	24.264.813	0,23%
Tabungan	1.604.924.779	15,23%
Deposito berjangka	7.912.000.000	75,06%
Simpanan pada bank lain	1.000.000.000	9,49%
Jumlah Kewajiban Lancar	10.541.189.592	100,00%
Cash Ratio	16,67%	

25. Rasio Kewajiban Penyediaan Dana Minimum

27

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

26. Rasio Rentabilitas

Bulan	2025			
	Total Aset	Pendapatan Operasional	Biaya Operasional	Aktiva Produktif
Januari	19.090.992.627	302.049.037	221.735.386	18.335.725.807
Februari	19.151.758.628	598.717.532	471.188.095	18.006.364.589
Maret	19.332.744.923	850.337.162	701.991.360	18.252.358.745
April	19.184.960.275	1.265.363.156	927.508.132	17.947.303.997
Mei	19.210.344.322	1.514.918.237	1.235.613.629	18.135.588.404
Juni	19.270.766.377	1.809.650.738	1.444.399.297	18.166.830.181
Juli	18.527.004.420	2.070.804.258	1.654.583.359	17.488.756.363
Agustus	18.503.901.445	2.312.852.301	1.888.609.763	17.561.101.807
September	18.173.573.626	2.607.893.462	2.118.874.461	17.263.013.627
Oktober	18.011.314.565	2.826.027.922	2.322.261.353	17.162.456.490
November	18.028.690.519	3.062.791.984	2.525.406.340	17.207.031.370
Desember	19.100.464.103	3.268.174.022	2.720.316.358	19.381.375.339
Jumlah	225.586.515.829	22.489.579.812	18.232.487.533	214.907.906.718

i. Return On Asset (ROA)

Rata - rata total aset	18.798.876.319
Laba rugi sebelum pajak	599.236.310

Return On Asset (ROA) **3,19%**

ii. Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya operasional	2.720.316.358
Pendapatan operasional	3.268.174.022

Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) **83,24%**

iii. Net Interest Margin (NIM)

Pendapatan bunga bersih	2.481.159.835
Rata-rata aktiva produktif	17.908.992.227

Net Interest Margin (NIM) **13,85%**

27. Rasio Lainnya

i. Rasio 25 Dep Dan Tab/Tot DPK

25 dep dan tab	8.651.741.556
Dana pihak ketiga	9.516.924.779

Rasio 25 Dep Dan Tab/Tot DPK **90,91%**

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

27. Rasio Lainnya

	2025
ii. Rasio 25 Deb INTI/Total Kredit	
25 deb inti	4.378.751.500
Total kredit	14.201.590.494
Rasio 25 Deb INTI/Total Kredit	30,83%
iii. Rasio Non Performing Loan (NPL)	
Kredit (kolektibilitas 3, 4 dan 5)	1.382.597.707
Total kredit	14.201.590.494
Rasio Non Performing Loan (NPL)	9,74%

28. Pengungkapan Lainnya

Jaminan Pemerintahan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perekonomian Rakyat

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu Bank Perekonomian Rakyat berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, maka pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan 2 milyar rupiah per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau di bawah 6,25% pada tanggal 31 Desember 2025.

29. Penerapan Pertama Kali SAK EP

Dampak Terhadap Laporan Keuangan

Penerapan pertama kali SAK EP mengakibatkan penyesuaian kebijakan akuntansi tertentu dan berdampak pada beberapa hal dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan arus kas

Dalam penerapan pertama kali SAK EP Bab 7 Laporan Arus Kas, BPR menyusun laporan arus kas menggunakan metode langsung sesuai dengan ketentuan Pedoman Akuntansi BPR.

Pada periode sebelumnya, laporan arus kas yang disusun berdasarkan SAK ETAP masih memperkenankan penggunaan metode tidak langsung. Sehubungan dengan penerapan SAK EP, penyajian laporan arus kas disesuaikan dengan metode langsung.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUTRA MAHKOTA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)

29. Penerapan Pertama Kali SAK EP - lanjutan

Dampak Terhadap Laporan Keuangan

2. Imbalan pascakerja

Berdasarkan SAK EP Bab 28 Imbalan Kerja, BPR wajib mengakui liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dengan metode *projected unit credit*. Jika BPR tidak mampu, tanpa biaya atau upaya berlebihan, untuk menggunakan metode *projected unit credit* untuk mengukur kewajiban dan biaya program imbalan pasti, maka BPR diperkenankan untuk membuat penyederhanaan.

Sebelumnya pada SAK ETAP, BPR belum sepenuhnya mengakui kewajiban tersebut sehingga dilakukan penyesuaian atas saldo liabilitas imbalan pascakerja dan beban terkait.

3. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)

Dalam penerapan pertama kali SAK EP dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat, BPR melakukan penyesuaian atas kebijakan pembentukan (CKPN) atas kredit.

Sehubungan dengan penerapan pertama kali SAK EP, dilakukan penyesuaian atas saldo CKPN pada awal periode penerapan.

4. Pendapatan bunga

Berdasarkan SAK EP Bab 11 Instrumen Keuangan, pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate / EIR*).

Sebelumnya, pengakuan pendapatan bunga dilakukan berdasarkan kontraktual sehingga dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan pendapatan bunga.

5. Provisi kredit

Berdasarkan SAK EP, provisi yang merupakan bagian dari biaya transaksi kredit seharusnya diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dan menjadi bagian dari perhitungan biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*). Berdasarkan SE OJK Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat, halaman 138 Bab 22 Pendapatan dan Beban Operasional poin 22.1.3 menyatakan bahwa metode perhitungan suku bunga efektif berdampak pada perhitungan provisi diamortisasi selama masa kredit, namun tidak secara garis lurus.

30. Tanggal Penyelesaian Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen BPR bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang diselesaikan pada tanggal 10 April 2026.

2025

Laporan Keberlanjutan

Sustainability Report



PUTRA MAHKOTA MANDIRI

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan	
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan	6
2.1. Kinerja Ekonomi	6
2.2. Kinerja Lingkungan Hidup	9
2.3. Kinerja Sosial	12
2.4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	14
3. Profil Bank	16
4. Penjelasan Direksi	20
5. Tata Kelola Keberlanjutan	25
Umpan Balik	29

Kata Pengantar

Laporan ini merupakan bentuk komitmen kami sebagai Lembaga Jasa Keuangan yang menyadari pentingnya praktik keuangan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip triple bottom line yaitu people (kesejahteraan masyarakat) , profit (keuntungan) dan planet (keberlanjutan lingkungan) yang tercermin dalam operasional bisnis Bank melalui keselarasan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola . Sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, PT BPR Putra mahkota Mandiri senantiasa berupaya untuk tidak hanya mencapai kinerja keuangan yang sehat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kami menyadari bahwa keberlanjutan merupakan perjalanan jangka panjang yang membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah, mitra kerja, regulator, serta seluruh karyawan PT BPR Putra Mahkota Mandiri yang telah memberikan dukungan dan kontribusi nyata dalam setiap langkah perusahaan.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen dan upaya kami dalam menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Laporan Keberlanjutan BPR Putra Mahkota Mandiri untuk Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai performa keberlanjutan Bank, meliputi bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial, yang diperuntukkan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

1.**Pendahuluan dan Penjelasan Strategi Keberlanjutan****Tentang Laporan Keberlanjutan**

BPR Putra Mahkota Mandiri menyadari pentingnya peran lembaga keuangan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sejalan dengan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas kinerja perusahaan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51 / POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantive mewajibkan BPR/BPRS untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Atas dasar tersebut BPR Putra Mahkota Mandiri wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) Tahun 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April 2025 bersamaan dengan Laporan Tahunan.

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran strategis di tengah masyarakat, kami percaya

bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi juga dari kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, laporan ini juga menjadi refleksi atas upaya perbaikan berkelanjutan dalam menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Dengan semangat kolaborasi dan perbaikan terus-menerus, kami berharap laporan ini dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif dan membangun kepercayaan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Mengacu pada Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bahwa format penulisan Laporan Keberlanjutan sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan
2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup)
3. Profil Singkat BPR/BPRS
4. Penjelasan Direksi
5. Tata kelola keberlanjutan
6. Kinerja keberlanjutan
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen
8. Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca dan
9. Tanggapan BPR/BPRS terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya

Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan PT BPR Putra Mahkota Mandiri tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51 / POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Laporan Keberlanjutan ini tidak lepas dari laporan tahunan yang telah disusun dan laporan keuangan teraudit untuk tahun buku 2025. Informasi yang disajikan dalam Laporan keberlanjutan ini memuat data dan informasi yang dikumpulkan dalam 1 (satu) tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Prinsip penetapan konten dalam Laporan ini didasarkan pada POJK 51 / POJK.03/2017 dan disusun berdasarkan 2 prinsip, yaitu *prinsip isi dan kualitas*.

Prinsip isi meliputi:

1. Konteks berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) ini disusun sejalan dengan konteks keuangan berkelanjutan.
2. Kelengkapan: Informasi disajikan sebagai informasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan kelengkapan bagi pembaca.

Prinsip kualitas adalah:

1. Keseimbangan : Informasi terkait capaian dan prestasi, serta tantangan disampaikan sesuai

dengan kondisi perusahaan.

2. Komparabilitas : Data yang disampaikan dalam laporan disajikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Akurasi : Angka dan informasi telah diperiksa secara internal Perusahaan sehingga diyakini akurasi.
4. Ketepatan waktu : Laporan ini disajikan tepat waktu bersama dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan : Informasi yang disajikan dalam laporan mudah untuk dipahami.

Topik material dalam Laporan ini adalah topik– topik yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Penetapan aspek material dan batasan didasarkan pada isu– isu yang berpengaruh signifikan bagi perusahaan serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR mengacu pada 8 (delapan) Prinsip keuangan berkelanjutan, dan 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/2017.

Delapan prinsip keuangan berkelanjutan adalah:

1. Investasi yang bertanggung jawab; adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi yang bertujuan agar dapat mengelola risiko secara lebih baik. Kami menerapkan prinsip ini melalui pemberian kredit yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dengan menganalisa potensi risiko yang ditimbulkan dari usaha yang dibiaya oleh Bank.
2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan; Kami menerapkan prinsip ini dengan menuangkannya pada kebijakan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) yang menjadi landasan perusahaan dalam menjalankan bisnis berkelanjutan di kegiatan usaha Bank.
3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup ; Kami telah memiliki prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) dalam mengukur risiko yang dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Bank. Selain risiko– risiko finansial, kami juga melakukan proses manajemen risiko khususnya mengukur risiko pemberian kredit atau pinjaman yang bersentuhan langsung dengan aspek sosial dan lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
4. Prinsip Tata Kelola; Kami menerapkan tata kelola keberlanjutan (ekonomi, lingkungan dan sosial) yang dibangun berdasarkan prinsip– prinsip penerapan GCG (Good Corporate Governance), yaitu transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan kewajaran.
5. Prinsip Komunikasi yang Informatif; Kami menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek Bank yang dapat dengan mudah diakses oleh para stakeholder melalui situs web perusahaan
6. Prinsip Inklusif; Bank menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/ atau jasa

yang dapat dengan mudah diakses oleh nasabah. Bank memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan yang keuangan.

7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas ; Dalam menyusun program keberlanjutan, kami mempertimbangkan sektor– sektor unggulan prioritas yang telah kami tetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Hal ini kami lakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung program pemerintah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi; Kami membuka diri untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan lembaga atau pemerintahan setempat terkait Bisnis Berkelanjutan dalam rangka penyelarasan strategi keberlanjutan Bank. Hal ini terlihat dari keanggotaan perusahaan pada perbarindo dan partisipasi dalam mendukung kegiatan– kegiatan yang memberdayakan masyarakat.

Sedangkan tiga prioritas RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) adalah:

1. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, antara lain mengidentifikasi dan memonitor portofolio pembiayaan Bank yang menunjang keuangan berkelanjutan.
2. Pengembangan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan meningkatkan awareness mengenai keuangan berkelanjutan (untuk pegawai dan nasabah), implementasi keuangan berkelanjutan pada sektor–sektor usaha yang menjadi fokus Bank.
3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar prosedur operasional, antara lain menyiapkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan, penyesuaian kebijakan internal Bank lainnya seperti Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, Kebijakan tata kelola keberlanjutan.

Strategi Keberlanjutan

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi UMKM, BPR Putra Mahkota Mandiri menetapkan strategi keberlanjutan yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Strategi keuangan berkelanjutan disusun berdasarkan pertimbangan visi dan misi PT BPR Putra Mahkota Mandiri dalam implementasi keuangan berkelanjutan, prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kami meyakini bahwa keberlanjutan bukan hanya sebagai kewajiban atas pemenuhan ketentuan, melainkan sebagai landasan utama dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi nasabah, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Segmen UMKM yang menjadi sasaran utama BPR Putra Mahkota Mandiri dalam pelayanan jasa keuangan diharapkan dapat membantu pengembangan produk dan/ atau jasa keuangan berwawasan lingkungan. BPR Putra Mahkota Mandiri berupaya meningkatkan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dalam berbagai upaya, di antaranya dengan menyusun rencana kerja, dan mengembangkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan regulator. Atas dasar tersebut diatas, BPR Putra Mahkota Mandiri mulai

LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025 PUTRA MAHKOTA MANDIRI

Website: bprputramahkotamandiri.com, Email: bprputramahkotamandiri@gmail.com

menerapkan prinsip– prinsip go green company sejak penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan menjalankan kegiatan– kegiatan diantaranya :

1. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan secara berkelanjutan guna membentuk karyawan yang profesional, adaptif dan berorientasi pada pelayanan.
2. Melaksanakan program– program sosial yang berdampak bagi masyarakat serta menerapkan kegiatan operasional yang ramah lingkungan, salah satunya berpartisipasi dalam melakukan kegiatan kebersihan di wilayah usaha Bank
3. Mengintegrasikan aspek– aspek keberlanjutan dalam manajemen risiko untuk menghadapi tantangan ekonomi, sosial dan lingkungan.
4. Menjalankan program “Hemat Energi” dengan pembatasan penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja dan mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.
5. Melakukan penghematan penggunaan bahan bakar minyak yang dapat menyebabkan polusi udara.
6. Program penggunaan tumbler bagi karyawan sebagai pengganti gelas air minum atau air dalam kemasan.
7. Mengurangi penggunaan kertas atau paperless dengan beralih ke dokumen– dokumen digital yang lebih ramah lingkungan.
8. Mengampanyekan efisiensi penggunaan air yang berada di lingkungan kantor.
9. Senantiasa mengingatkan karyawan agar tetap menjaga kebersihan lingkungan dan tempat kerja.

Ke depannya, BPR Putra Mahkota Mandiri akan senantiasa memperkuat implementasi strategi keberlanjutan ini secara bertahap, dengan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan evaluasi berkala, agar sejalan dengan dinamika bisnis dan harapan seluruh pemangku kepentingan.

2.

Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan

1. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Ekonomi

Perbandingan Target dan Kinerja Keuangan, Portofolio, Pendapatan dan Laba Rugi

Keterangan	2025	2024	2023
Kinerja Keuangan (Dalam Satuan Rupiah Penuh)			
Total Aset	19.100.464.103	18.638.746.674	17.580.270.560
Antar Bank Aktifa (ABA)	5.179.784.845	4.420.394.049	4.977.157.367
Kredit yang Diberikan	14.201.590.494	13.843.811.702	12.297.231.115
Dana Pihak Ketiga	9.516.924.779	9.659.207.565	10.411.197.454
Antar Bank Pasiva (ABP)	1.300.000.000	1.750.000.000	0
Modal	8.065.481.319	6.993.555.812	6.922.565.623
Pendapatan Operasional & Non Operasional	3.319.752.668	3.002.738.081	2.780.997.574
Beban Operasional & Non Operasional	2.790.697.276	2.478.620.269	2.259.791.816
Laba Bersih	529.055.392	524.117.812	521.205.758
Rasio Kinerja (Dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPM)	91,31	78,05	85,90
Rasio Modal Inti terhadap Aset produktif bermasalah netto (MIAPB)	950,74	1.146,10	2.189,46
Return On Asset (ROA)	3,19	3,41	3,43
Rasio BOPO	83,24	81,12	80,04
Net Interest Margin (NIM)	13,85	13,15	12,26
Current Ration (CR)	16,67	15,31	16,15
Loan to Deposit Ratio (LDR)	149,22	146,15	120,29
NPL Gross	9,74	5,59	3,52
NPL Net	5,96	4,16	2,43
PPAP/CKPN	100	100	100

LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025

PUTRA MAHKOTA MANDIRI

Website: bprputramahkotamandiri.com, Email: bprputramahkotamandiri@gmail.com

Berdasarkan data pertumbuhan Bank selama tiga tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa Bank menunjukkan peningkatan dari Asset, Kredit Yang Diberikan, Modal dan Pencapaian Laba setiap akhir tahun. Sekalipun peningkatan yang terealisasi tidak signifikan namun kondisi ini mengindikasikan Bank terus bertumbuh. Dari pertumbuhan Dana Pihak ke III setiap tahun terus mengalami penurunan sehingga untuk mengatasi Likuiditas, Bank menerima Dana dalam bentuk Antar Bank Pasiva namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dari Tingkat Kesehatan Bank, Pada ratio Permodalan Bank sangat Kuat dengan KPMM yang sangat Sehat, Rentabilitas Bank juga SEHAT dimana Bank mampu menghasilkan Laba dan mampu mengefisienkan penggunaan Biaya Operasional.

Ratio yang perlu menjadi perhatian Bank adalah Ratio LDR yang cukup Besar sehingga Bank harus meningkatkan Dana pihak ke III untuk menormalkan kembali kondisi LDR, begitupun dengan Ratio NPL dimana Bank perlu lebih prudent dalam pemberian Kredit serta lebih giat melakukan penagihan dan melakukan monitoring terhadap debitur-debitur yang menunggak.

Kinerja Aspek Ekonomi terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	1	1	1	1
a.1. DPK	1	1	1	1
a.2. Surat Berharga	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	2	2	2	2
b.1. Kredit / Pembiayaan	2	2	2	2
b.2. Surat Berharga	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Outstanding produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Dalam Satuan Rupiah Penuh)				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	1.537.067.342	1.145.164.210	1.538.697.650	2.639.052.027
a.1. DPK	1.537.067.342	1.145.164.210	1.538.697.650	2.639.052.027
a.2. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	7.837.233.155	6.477.957.583	7.768.079.587	6.662.421.174
b.1. Kredit / Pembiayaan	7.837.233.155	6.477.957.583	7.768.079.587	6.662.421.174
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Total Outstanding DPK (Rp)	10.595.326.633	9.516.924.779	9.659.207.565	10.411.197.454

LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025

PUTRA MAHKOTA MANDIRI

Website: bprputramahkotamandiri.com, Email: bprputramahkotamandiri@gmail.com

Total Nominal Surat Berharga yang diterbitkan (Rp)	-	-	-	-
Total Outstanding Kredit Kepada Pihak Ketiga (Rp)	18.053.294.688	14.201.590.494	13.843.811.702	12.297.231.115
Total Nominal Surat Berharga yang dimiliki (Rp)	-	-	-	-

Persentase Total Portofolio Kegiatan Usaha Berkelanjutan terhadap Total Portofolio (%)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan				
a.1. DPK	14,51%	12,03%	15,93%	25,35%
a.2. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan (Kredit)				
b.1. Kredit / Pembiayaan	43,41%	45,61%	56,11%	54,18%
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-

Total outstanding kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-

I. Kegiatan UMKM	7.837.233.155	6.477.957.583	7.768.079.587	6.662.421.174
Total outstanding kredit/ pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (total a – l)	7.837.233.155	6.477.957.583	7.768.079.587	6.662.421.174

Pemberian layanan keuangan di segmen UMKM, yang menjadi fokus utama Bank, merupakan segmen pasar yang sangat potensial. UMKM, yang termasuk dalam salah satu Kategori Usaha Berkelanjutan, saat ini telah menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip investasi bertanggung jawab dimana Bank mempertimbangkan peningkatan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasabah dalam penyaluran dana.

Dalam Penghimpunan Dana, Bank juga memberikan porsi yang cukup besar bagi pelaku UMKM untuk menempatkan dananya di Bank dalam bentuk Tabungan. Bank menyediakan produk tabungan untuk menampung Simpanan dan pembayaran Pinjaman pelaku UMKM. Untuk Dana Pihak ke III dalam bentuk Deposito masih di dominasi oleh penempatan dari Pihak Terkait Bank.

2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Lingkungan Hidup

Kegiatan Internal dan Kegiatan TJSL

Dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, BPR Putra Mahkota Mandiri telah mengimplementasikan operasional Bank ramah lingkungan sebagai bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan. Dalam rangka memastikan kegiatan operasional dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, budaya kesadaran lingkungan penting untuk dibangun di dalam kantor BPR Putra Mahkota Mandiri. Oleh karena itu, Bank berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan data lingkungan di Kantor pada tahun 2025. Langkah nyata pemeliharaan lingkungan dilakukan salah satunya melalui efisiensi penggunaan kertas, air, listrik dan bahan bakar minyak. Serta Melaksanakan Program penggunaan “Tumbler” sebagai pengganti gelas untuk mengurangi penggunaan minuman Kemasan.

Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

Efisiensi Penggunaan Kertas

Sebagai bentuk komitmen BPR Putra Mahkota Mandiri dalam mengurangi dampak negatif seperti penebangan pohon dan emisi gas rumah kaca, Bank berupaya menerapkan efisiensi penggunaan kertas. Hal ini tentunya tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan namun juga bisa berdampak besar pada biaya operasional. Salah satu hal yang mulai dilakukan adalah digitalisasi dokumen, penggunaan kertas bekas (sisi sebaliknya) untuk mencetak draft surat keputusan, notulen atau memo.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Bank masih mengalami peningkatan biaya kertas. Peningkatan

biaya ini diakibatkan juga oleh adanya kenaikan harga kertas. Ke depannya dengan adanya penerapan digitalisasi pelaporan yang dicanangkan oleh OJK yang menggeser semua laporan luring (offline) menjadi daring (online) Bank berusaha untuk mengurangi penggunaan kertas (paperless).

Efisiensi Penggunaan Listrik

Listrik merupakan energi yang sangat diperlukan untuk mendukung operasional Bank, industri lainnya maupun rumah tangga. Bank menyadari besarnya kebutuhan operasional akan listrik dan sebagian besar listrik yang dipakai bersumber dari PLTU yang menggunakan batu bara sebagai sumber pembangkit, yang termasuk sumber energi tak terbarukan. Oleh karena ketersediaan listrik semakin terbatas, Bank berupaya untuk melakukan efisiensi sehingga tidak terjadi pemborosan energi. Pemakaian listrik selama tiga tahun terakhir di BPR Putra Mahkota Mandiri masih mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan beberapa perangkat komputer atau operasional lainnya guna mendukung program digitalisasi. Peningkatan yang tinggi terjadi pada tahun 2024 yang diakibatkan oleh adanya peningkatan tarif dasar listrik. Dengan belum optimalnya efisiensi penggunaan listrik, kedepannya Bank akan lebih berupaya lagi untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan listrik dengan program program yang lebih baik.

Efisiensi Penggunaan Air

Air adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan. Tidak hanya bagi tubuh manusia, air juga sangat berperan penting dalam semua lini kehidupan, mulai dari industri, rumah tangga maupun perbankan. Efisiensi penggunaan air sangat penting untuk dilakukan. Langkah nyata yang dapat kita lakukan adalah dengan mematikan kran air apabila tempatnya sudah terisi penuh (tidak membiarkan air terbuang), melakukan pemeliharaan saluran air untuk menghindari terjadinya kebocoran air, mengkampanyekan kepada karyawan tentang pentingnya menghemat air.

Efisiensi Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Sama halnya dengan listrik, air dan juga kertas, bahan bakar minyak atau yang selanjutnya disebut BBM juga sangat penting dalam kegiatan operasional Bank. BBM digunakan untuk memenuhi kebutuhan penggunaan kendaraan operasional Bank. Kendaraan operasional Bank lebih banyak digunakan untuk kegiatan perkreditan seperti survey jaminan calon debitur, kunjungan ke nasabah dan kegiatan lainnya. Efisiensi penggunaan BBM dilakukan dengan menerapkan penggabungan keperluan dinas dalam satu perjalanan, pemeliharaan kendaraan yang baik agar lebih efisien dalam konsumsi BBM. Berdasarkan tabel diatas terlihat penggunaan BBM selama tiga tahun terakhir berfluktuasi. Terjadi peningkatan penggunaan di tahun 2024 dan 2025 disebabkan karena adanya penambahan 1 unit kendaraan operasional berupa Motor dan perluasan pangsa pasar ke lokasi yang jauh dari lokasi kantor BPR. Kedepannya Bank akan terus berusaha untuk mengefisienkan penggunaan BBM dalam kegiatan operaional Bank.

Penggunaan Energi (antara lain Air dan Listrik)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penggunaan Bahan Bakar (Liter)	2.250	2.229	2.002	1.708
b. Penggunaan Listrik (kWh)	16.500	16.430	15.853	14.374
c. Penggunaan Air (m3)	2.640	2.550	2.640	2.630
d. Penggunaan Kertas (kg)	250	257	196	159

3. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan, Kinerja Sosial dan Keuangan Inklusi**Komitmen Perusahaan dan Kinerja Keuangan Inklusi**

1. BPR Putra Mahkota Mandiri telah memberikan layanan yang setara kepada semua debitur atas produk dan/ atau jasa yang dimiliki serta menyampaikan informasi produk dan/ atau jasa akurat kepada debitur.
2. BPR telah melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan dampak positif tentang produk keuangan terhadap masyarakat termasuk dalam program literasi dan inklusi keuangan.
3. BPR telah memberikan pendampingan dan penjelasan yang lengkap dan benar mengenai, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. BPR telah memberikan sosialisasi dan pelatihan anti fraud yang diikuti oleh seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran pada perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab.

Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

1. Kesetaraan Kesempatan Bekerja: Melakukan rekrutmen dan pengembangan karyawan yang secara berkelanjutan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan dalam membangun karir serta sebagai metode untuk menyiapkan karyawan (kaderisasi) menjadi pemimpin di masa yang akan datang.
2. Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman: BPR berupaya menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman dengan menjaga kebersihan serta menerapkan Kode Etik Bankir dalam berperilaku.
3. Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Karyawan: BPR menyelenggarakan pelatihan secara berkesinambungan baik melalui daring maupun luring, yang dimaksimalkan pada pelatihan secara daring.

LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025 PUTRA MAHKOTA MANDIRI

Website: bprputramahkotamandiri.com, Email: bprputramahkotamandiri@gmail.com

Kinerja Aspek Sosial Terkait Inklusivitas Ketenagakerjaan Internal Bank

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Pegawai Bank	14	14	13	13
Jumlah Direksi dan Komisaris (Total Jumlah Pria dan Wanita)	4	4	4	4
Jumlah Direksi dan Komisaris Pria	2	2	2	2
Jumlah Direksi dan Komisaris Wanita	2	2	2	2
Jumlah Pegawai Difable	-	-	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Masyarakat

1. Literasi dan Inklusi Keuangan: PT. BPR Putra Mahkota Mandiri melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2025 sesuai dengan pelaporan yang telah dilaporkan ke pihak OJK dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang produk, layanan serta topik keuangan berkelanjutan dan menyediakan akses keuangan yang setara kepada seluruh masyarakat. Kegiatan literasi dan inklusi keuangan dilaksanakan di beberapa daerah di Pekanbaru Dan Kampar.
2. Mekanisme pengaduan Masyarakat: Bank telah menyediakan wadah kepada masyarakat apabila ada pengaduan yang akan disampaikan ke BPR, baik terkait pelayanan maupun produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank. Setiap pengaduan nasabah akan diterima, ditangani dan diselesaikan sesuai dengan kebijakan internal dan eksternal tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: Tanggung jawab sosial dan lingkungan diwujudkan nyata oleh PT. BPR Putra Mahkota Mandiri dengan :
 - Menjaga kebersihan lingkungan kantor.
 - Penghematan Penggunaan Kertas.
 - Penghematan penggunaan Listrik.
 - Penghematan penggunaan BBM
 - Penghematan penggunaan Air

4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan**Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan**

PT. BPR Putra Mahkota Mandiri sampai akhir tahun 2025 belum pernah melakukan inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan. Dalam Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan Bank masih fokus dalam pembiayaan ke pihak UMKM.

Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan

Seluruh Produk dan Jasa yang ditawarkan oleh pihak Bank ke Masyarakat telah dibuatkan Prosedur dan Kebijakan yang berlaku, sehingga seluruh karyawan PT. BPR Putra Mahkota telah memiliki acuan yang sama dalam memasarkan produk dan Jasa. Produk dan jasa yang ditawarkan Bank juga telah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah teruji keamanannya bagi nasabah. Selaras dengan itu, untuk menekan risiko kerugian seminimal mungkin atas produk dan jasa tersebut, PUTRA MAHKOTA MANDIRI secara kontinyu menyampaikan informasi atas semua risiko yang mungkin terjadi kepada nasabah, seperti risiko pasar dan risiko fluktuasi mata uang.

Sejalan dengan itu, sesuai regulasi yang ada, PUTRA MAHKOTA MANDIRI juga melakukan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara berkala sehingga calon nasabah atau nasabah mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk/ jasa yang ditawarkan Bank. Dengan demikian, mereka akan melakukan investasi sesuai kebutuhan dan telah mengetahui profil risiko yang melekat di dalam produk/jasa tersebut.

Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan**Dampak Positif**

1. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Menyediakan pendanaan untuk Usaha UMKM dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Peningkatan Manajemen Risiko: Penerapan kriteria ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang ketat menurunkan risiko kredit dan operasional.
3. Akses Pendanaan Sosial: Meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Citra Perusahaan yang Lebih Baik: Bank yang menerapkan keuangan berkelanjutan cenderung lebih disukai konsumen dan investor.

Dampak Negatif

1. Biaya Manajemen Risiko Tinggi: Penerapan prinsip berkelanjutan membutuhkan biaya tinggi

LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025 PUTRA MAHKOTA MANDIRI

Website: bprputramahkotamandiri.com, Email: bprputramahkotamandiri@gmail.com

untuk audit dan proses manajemen risiko, yang dapat mengurangi laba jangka pendek.

2. Penurunan Pendapatan Jangka Pendek: Fokus pada proyek berkelanjutan dapat mengurangi penerimaan bank sementara waktu.
3. Risiko *Greenwashing*: Potensi ketidaksesuaian antara label produk (hijau) dengan praktik nyata di lapangan.
4. Kompleksitas Implementasi: Membutuhkan penyesuaian strategi dan peningkatan kapasitas SDM yang signifikan.

Penerapan keuangan berkelanjutan sangat dibutuhkan oleh Bank hal ini bertujuan untuk membangun daya saing dan ketahanan terhadap risiko sosial-lingkungan.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal PUTRA MAHKOTA MANDIRI maupun perintah dari regulator (OJK).

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

PT. BPR Putra Mahkota Mandiri belum melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan, namun di sepanjang tahun 2025 tidak ada pengaduan dari nasabah atau masyarakat terhadap produk dan jasa Bank yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

3.

Profil Bank

Informasi Umum Perusahaan	
Nama Perusahaan	PT BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI
Alamat	JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 7D KOMPLEK BUSINESS PARK, PEKANBARU
Nomor Telepon	081298404004
Email	bprputramahkotamandiri@gmail.com
Website	bprputramahkotamandiri.com

Skala Usaha Bank

1) Total Aset dan Kewajiban

DESKRIPSI	2025	2024	2023
Asset	19,100,464,103	18,638,746,674	17,580,270,560
Dana Pihak ke III	9,516,924,779	9,659,207,565	10,411,197,454
Antar bank Pasiva	1,300,000,000	1,750,000,000	-
Kewajiban	218,058,004	188,103,298	246,507,483

2) Jumlah Karyawan

PT. BPR Putra Mahkota Mandiri melakukan optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kompetensi karyawan dan memperhatikan komposisi karyawan sesuai dengan kebutuhan operasional.

a. Jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	2025	2024	2023
Pria	8 Orang	7 Orang	7 Orang
Wanita	6 Orang	6 Orang	6 Orang
Jumlah	14 Orang	13 Orang	13 Orang

b. Jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	2025	2024	2023
Pasca Sarjana (S2)	1 Orang	1 Orang	1 Orang
Sarjana (S1)	8 Orang	5 Orang	5 Orang
Diploma (D3)			
SMA Sederajat	5 Orang	7 Orang	7 Orang
Jumlah	14 Orang	13 Orang	13 Orang

c. Jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan status ketenagakerjaan

STATUS KETENAGAKERJAAN	2025	2024	2023
PKWTT	6 Orang	9 Orang	9 Orang
PKWT	8 Orang	4 Orang	4 Orang
Alih Daya			
Jumlah	14 Orang	13 Orang	13 Orang

3) Persentase Kepemilikan Saham

NAM A PEM EGANG SAHAM	Jumlah Lembar Saham	Nominal	Kepemilikan
HERRY AMIN	3,600	3,600,000,000	60%
FATMAWATI	1,200	1,200,000,000	20%
ERICK CAESARANI	600	600,000,000	10%
ALEXANDER	600	600,000,000	10%
Jumlah	6,000	6,000,000,000	100%

4) Wilayah Operasional Bank

PT. BPR Putra Mahkota Mandiri sampai akhir tahun 2025 belum memiliki Kantor Cabang ataupun Kantor Kas. Saat ini Wilayah Operasional Bank di wilayah Riau dengan alamat Kantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 7 D Komplek Business Park, Kel.Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, RIAU.

Produk dan Layanan

1. SIMPANAN

A. TABUNGAN

1) Tabungan Umum (TAMU)

Tabungan Umum atau disebut dengan (TAMU) adalah salah satu produk tabungan yang dimiliki PT. BPR Putra Mahkota Mandiri. Tabungan ini bisa dimiliki secara perorangan maupun badan usaha atau organisasi yang memiliki banyak transaksi keuangan sehingga dapat menarik dan menyetor uang berkali-kali selama jam kerja untuk berbagai kebutuhan. Tabungan Umum ini juga merupakan tabungan penampung untuk pembayaran cicilan kredit bagi Debitur BPR Putra Mahkota Mandiri.

2) Tabungan Masa Depan (TAMPAN)

Tabungan Masa Depan (Tampam) adalah tabungan berjangka dengan beberapa pilihan jangka waktu (minimal 2 tahun), merupakan tabungan untuk investasi guna berbagai keperluan, seperti ; renovasi rumah, pembelian kendaraan, biaya sekolah anak/ kuliah, pernikahan dan

persiapan memasuki purna karya (pensiun) bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, seperti ; pegawai negeri, karyawan swasta dan profesional, tetapi bisa juga bagi masyarakat yang memiliki usaha sendiri (wiraswasta). Tabungan Masa Depan (Tampan) merupakan tabungan untuk perorangan yang hanya boleh diambil/ dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama antara nasabah penabung dengan Bank sewaktu pengisian formulir pembukaan tabungan.

3) Tabungan Pendidikan (TANDIKA)

Tabungan Pendidikan merupakan tabungan berjangka untuk kebutuhan biaya pendidikan anak- anak guna melanjutkan solusi bagi orang tua mempersiapkan biaya pendidikan anak- anak sedini mungkin. TANDIKA khusus diperuntukan bagi anak- anak dalam masa pendidikan, mulai dari PAUD, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan untuk biaya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

TANDIKA bukan tabungan biasa, jangka waktu menabung bervariasi sesuai dengan keinginan dan kemampuan anak- anak (minimal 1 tahun) dengan setoran perbulan tetap, minimal Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) atau kelipatannya dan setiap penabung dilindungi dengan Asuransi Personal Accident dengan manfaat ; kematian biasa, kematian karena kecelakaan, dan cacat tetap karena kecelakaan tanpa harus membayar premi.

B. DEPOSITO

Deposito adalah simpanan berjangka nasabah perorangan maupun badan usaha (Perusahaan/ Organisasi/ Yayasan) yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang disepakati, dengan persyaratan tertentu oleh pihak Bank baik secara tunai maupun pemindahbukuan dan atas simpanan tersebut Bank memberikan imbalan jasa berupa bunga, yang besarnya ditentukan oleh Bank dan dibayarkan pada saat jatuh tempo dibulan berikutnya.

2. KREDIT

a) Kredit Modal Kerja

Fasilitas kredit yang ditujukan untuk meningkatkan dan pengembangan usaha debitur dengan cara menambah modal untuk peningkatan jumlah bahan baku, persediaan barang jadi dan biaya lainnya yang berkaitan dengan operasional usaha.

b) Kredit Investasi

Fasilitas kredit yang ditujukan untuk menambah kapasitas usaha atau kapasitas produksi debitur, diantaranya untuk perluasan tempat usaha, penambahan alat produksi seperti mesin berikut pemasangannya, dan sebagainya.

Kredit Investasi juga berupa penambahan asset bagi seseorang dapat berbentuk tanah perumahan/ perkebunan/ pertanian, rumah/ ruko dan kendaraan. Bank hanya membiayai 80% dari rencana investasi dari debitur, sedangkan 20% merupakan dana sendiri/debitur.

c) Kredit Konsumtif

Fasilitas kredit yang ditujukan untuk keperluan konsumtif debitur (membeli barang- barang untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri guna mendukung kehidupan sehari- hari seperti

kendaraan bermotor, renovasi rumah, perabotan rumah tangga, biaya sekolah/ kuliah, biaya pernikahan dan sebagainya).

Profil Singkat dan Nilai Keberlanjutan Bank

a. Visi Keberlanjutan

Menjadi BPR terbaik dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

b. Misi Keberlanjutan

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.
2. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.
3. Membangun Tata kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek social dan lingkungan hidup.

c. Budaya Bank Berkelanjutan

Budaya Kepatuhan: Seluruh jajaran bank bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap aturan dan prinsip keberlanjutan, mulai dari tingkat atas (tone at the top).

"Green Lifestyle" di Tempat Kerja: Implementasi gaya hidup hijau di internal bank, seperti pengurangan penggunaan kertas (paperless), penghematan listrik, air, dan penggunaan bahan bakar yang efisien. Dan mensosialisasikan kepada seluruh karyawan untuk mengurangi menggunakan minuman kemasan dengan mengkampanyekan membawa tumbler.

Transparansi dan Pelaporan: Mengomunikasikan laporan keberlanjutan secara jujur, terukur, dan terbuka kepada pemangku kepentingan

d. Keanggotaan Pada Asosiasi Regional hingga Nasional

PT. BPR Putra Mahkota Mandiri tergabung dalam asosiasi perbankan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) sebagai anggota, khusus untuk lingkup DPD Perbarindo RIAU.

4.**Penjelasan Direksi****Penjelasan Direksi****Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan**

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal, BPR Putra Mahkota Mandiri memiliki komitmen untuk membangun masa depan berkelanjutan dengan mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan. Nilai-nilai keberlanjutan ini berfokus pada tiga aspek utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Aspek Ekonomi

BPR Putra Mahkota Mandiri terus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat kecil terutama pelaku UMKM. Inovasi produk, memberikan kemudahan akses terhadap nasabah maupun masyarakat luas akan menjadi fokus kami kedepannya dalam memperkuat ketahanan ekonomi rakyat.

Aspek Sosial

Keberlanjutan juga berarti memperkuat relasi dengan masyarakat luas melalui berbagai kegiatan sosial dan program-program yang memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti program edukasi keuangan, bantuan sosial, kegiatan bersih-bersih lingkungan, dan lainnya. Tidak hanya kepada masyarakat, pemberian program pelatihan untuk mengembangkan kompetensi karyawan, mendorong terciptanya budaya kerja yang sehat dan beretika juga termasuk dalam implementasi aspek sosial keberlanjutan. Aspek sosial keberlanjutan bukan hanya tentang berbagi, namun bagaimana membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan sosial.

Aspek Lingkungan

Tujuan utama dari aspek lingkungan dalam keberlanjutan adalah mendukung keberlanjutan bumi dengan cara mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan ke dalam proses bisnis. Langkah nyata yang dapat kita lakukan adalah mulai dari efisiensi penggunaan energi dan senantiasa menjaga lingkungan.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

PT. BPR Putra Mahkota Mandiri melaksanakan pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan pihak internal maupun eksternal dimana hal ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Dengan menerapkan keuangan berkelanjutan secara konsisten, Bank tetap menunjukkan komitmen dan kontribusinya pada penerapan keuangan berkelanjutan yaitu :

1. Dalam menjalankan usahanya, BPR Putra Mahkota Mandiri selalu berpegang pada prinsip ke hati-hatian (prudential banking), terutama ketika melakukan proses penyaluran kredit.
2. Meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan lingkungan dalam aktivitas operasional perusahaan.
3. Meningkatkan pemahaman seluruh karyawan mengenai permasalahan sosial dan lingkungan, yang kemudian diimplementasikan ke dalam setiap kegiatan usaha Bank.
4. Mengurangi penggunaan kertas (paperless), Listrik, Air dan Bahan Bakar Minyak.
5. Penggunaan Tumbler sebagai pengganti gelas air minum atau air dalam kemasan.
6. Mendorong inklusi keuangan dengan memberikan dukungan finansial yang mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat.

Strategi Pencapaian Target

Dalam era transformasi, Bank tidak hanya dituntut untuk mencapai laba namun juga dituntut agar dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan. Penetapan strategi keberlanjutan serta mitigasi akan risiko dari 3 aspek penting kehidupan (ekonomi, sosial dan lingkungan) menjadi poin penting yang harus diperhatikan untuk mewujudkan hal tersebut. Adapun beberapa strategi yang dilakukan antara lain peningkatan pengetahuan semua jenjang organisasi mengenai keuangan berkelanjutan, menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada lingkungan dan sosial dalam operasional keseharian, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan portofolio produk keuangan berkelanjutan. Selama tahun 2025, BPR Putra Mahkota Mandiri belajar untuk menjadi lebih baik dalam memberikan layanan keuangan berkelanjutan. Dalam upaya mengoptimalkan dampak positif bagi lingkungan, kami berharap adanya kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, regulator dan asosiasi untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Internal**1. Fokus Bisnis Bank**

Fokus pada Profit Jangka Pendek: Orientasi masih dominan pada ekonomi pertumbuhan (pro- growth) dan keuntungan instan, daripada kinerja ESG jangka panjang. Karena masih banyak hal- hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sementara Skala Bank saat ini masih kecil.

Resistensi terhadap Perubahan: Adanya kesulitan di internal perusahaan untuk mengubah proses bisnis tradisional menuju praktik bisnis berkelanjutan, Misalnya; SDM yang belum memadai, Keterbatasan Modal/ Biaya Tinggi.

2. Operasional Bank

Transparansi Laporan Internal: Kurangnya mempublikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) secara terbuka, sering kali baru sebatas pelaporan administratif ke OJK.

Kurangnya Sosialisasi terkait Keuangan Berkelanjutan: Keuangan Berkelanjutan merupakan Hal yang baru bagi BPR dan masih perlu pendalaman ilmu dan informasi mulai dari level atas sampai level bawah untuk menjadikan keberlanjutan sebagai strategi inti perusahaan.

3. Kebijakan Internal

Bank Kesulitan dalam mengintegrasikan kriteria ESG ke dalam kebijakan kredit, investasi, dan manajemen risiko perusahaan.

4. Keahlian SDM Bank

Minimnya SDM Kompeten: Kurangnya pemahaman dan keahlian di tingkat manajemen dan karyawan mengenai prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), taksonomi hijau, dan manajemen risiko iklim.

Kelemahan Mitigasi Risiko: Rendahnya kapasitas dan pemahaman SDM untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh nasabah pembiayaan.

Upaya yang dilakukan

Bank mengikuti pelatihan– pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan dan mencari informasi terkait pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di beberapa Perbankan yang telah lebih dulu dan sukses melaksanakan Kegiatan ini. Mencontoh hal–hal baik dan menyadur Kegiatan yang terkait Keuangan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki Bank.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Eksternal

1. Kebijakan Pemerintah

Ketidakpastian dan Ketidaksamaan Regulasi/ Taksonomi: Terdapat kesenjangan dalam regulasi lingkungan hidup dan keuangan, di mana taksonomi hijau yang ada kadang belum sepenuhnya seragam atau selaras dengan standar internasional, yang menyulitkan LJK dalam menetapkan proyek yang benar–benar hijau. Selain itu, peraturan yang ada sering kali dianggap masih simbolistik atau belum memiliki daya paksa yang kuat.

Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan: Implementasi di lapangan sering terhambat oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Hal ini membuat pelaku usaha kurang termotivasi untuk mematuhi standar ESG jika tidak ada sanksi yang tegas.

2. Perekonomian Nasional, Regional, dan Global

1. Produk keuangan berkelanjutan sering kali kalah bersaing dengan produk konvensional dari segi biaya dan pengembalian.
2. Adanya pandangan pro– pertumbuhan (pro– growth) yang masih mengutamakan pertumbuhan ekonomi konvensional dan profitabilitas jangka pendek dibanding kinerja ESG jangka panjang.

3. Lainnya

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, pelaku industri, dan nasabah mengenai konsep keuangan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan permintaan akan produk yang sesuai dengan Keuangan Berkelanjutan masih terbatas.
2. Sulitnya mendapatkan data yang akurat dan terverifikasi mengenai profil risiko lingkungan dari debitur atau perusahaan. Laporan keberlanjutan yang disajikan sering kali tidak transparan atau sekadar self–declaration, sehingga menyulitkan penilaian risiko.

LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025 PUTRA MAHKOTA MANDIRI

Website: bprputramahkotamandiri.com, Email: bprputramahkotamandiri@gmail.com

Upaya yang dilakukan

1. Bank tetap mengupayakan untuk terus melaksanakan Keuangan Berkelanjutan sekalipun masih dalam porsi yang kecil karena adanya keterbatasan kemampuan dan informasi terkait Keuangan Berkelanjutan.
2. Setiap Penyaluran dana ke UMKM, Bank tetap memperhatikan dampak usaha yang akan dibiayai terhadap lingkungan.

5.**Tata Kelola Keberlanjutan****Struktur Tata Kelola Keberlanjutan****Tugas dan Tanggung Jawab Seluruh Pihak Yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan****Dewan Komisaris**

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang merupakan salah satu kebijakan spesifik Bank.
2. Memberikan persetujuan terhadap RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan mengusulkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada Dewan Komisaris.
3. Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) kepada Dewan Komisaris.
4. Mengkomunikasikan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
5. Memantau satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan.

Unit Kerja Keuangan Berkelanjutan (Bagian Kepatuhan)

1. Bertanggung jawab kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan program Aksi Keuangan Berkelanjutan pada perusahaan.

2. Melakukan sosialisasi terhadap program Aksi Keuangan Berkelanjutan pada unit.
3. Melakukan perbaikan– perbaikan yang diperlukan pada pelaksanaan program Aksi Keuangan Berkelanjutan

Bagian Umum & Personalia

1. Melaksanakan program Keuangan Berkelanjutan pada unit kerjanya.
2. Menyediakan anggaran yang telah disetujui Direksi untuk melaksanakan program Keuangan Berkelanjutan.
3. Menyediakan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam implementasi program Keuangan Berkelanjutan.

Bagian Operasional

1. Melaksanakan program Keuangan Berkelanjutan pada unit kerjanya.
2. Melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan.

Bagian Bisnis

1. Melaksanakan program Keuangan Berkelanjutan pada unit kerjanya.
2. Menjalinkan kerja sama dengan pihak– pihak yang dianggap bisa membantu pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan perusahaan.

Bagian Pengawasan (AI)

1. Melakukan fungsi pengawasan terhadap rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
2. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Bagian Lainnya

Mendukung pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan di bidangnya masing–masing.

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

PT BPR Putra Mahkota Mandiri telah membentuk unit kerja keuangan berkelanjutan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi karyawan terkait Keuangan Berkelanjutan yang dirangkap oleh Bagian Kepatuhan. Bagian Kepatuhan telah melakukan Sosialisasi dengan memberikan informasi kepada masing-masing divisi terkait dengan penerapan dan pentingnya keuangan berkelanjutan, melalui penerapan efisiensi penggunaan energi baik listrik, bahan bakar minyak dan air. Mengurangi penggunaan kertas dengan tetap memanfaatkan kertas bekas (sisi sebaliknya) untuk mencetak draft surat atau kebijakan pada masing-masing divisi. Penerapan carpooling atau penjadwalan perjalanan yang searah agar dapat mengurangi penggunaan kendaraan.

Bank juga mengkampanyekan untuk setiap Karyawan menggunakan “Tumbler” untuk mengurangi penggunaan minuman kemasan. Kedepannya BPR Putra Mahkota Mandiri akan berusaha untuk semakin meningkatkan pengembangan kompetensi keuangan berkelanjutan dan implementasinya dalam operasional Bank.

Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Identifikasi risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berkelanjutan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, namun juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan memahami dan mengelola risiko – risiko terkait aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup Bank dapat menciptakan nilai keberlanjutan untuk jangka panjang.

BPR Putra Mahkota Mandiri berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait aspek lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko Bank, melalui penyusunan kebijakan perkreditan maupun prosedur terkait portofolio produk yang termasuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, Bank akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Keterlibatan dan Penjelasan Terkait Pemangku Kepentingan

Pemegang Saham

Pemegang Saham, memiliki peran mengarahkan Bank untuk mengadopsi prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) bagian dari strategi jangka panjang dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keberlanjutan.

Pemerintah

Peran pemerintah dalam penerapan **keuangan berkelanjutan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR)** penting karena pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan, regulator, sekaligus penggerak ekosistem pembangunan ekonomi. Melalui peran ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan PUTRA MAHKOTA MANDIRI menerapkan prinsip keberlanjutan secara efektif tanpa mengabaikan kelangsungan usaha dan prinsip kehati-hatian.

Otoritas

Regulator yang meliputi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, memiliki peran menetapkan kebijakan dan regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Mendorong pelaporan keberlanjutan dan penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Memberikan dukungan kebijakan dan arah strategis nasional tentang Keuangan Berkelanjutan.

Akademisi

1. Dalam penerapan **keuangan berkelanjutan**, PUTRA MAHKOTA MANDIRI menambah pengetahuan dan referensi dari para akademisi yang akan dijalankan bank sehingga memiliki pendasaran ilmiah dan dapat terus disempurnakan.
2. Akademisi juga menghasilkan riset dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan yang dapat menjadi rujukan bagi PUTRA MAHKOTA MANDIRI dalam menyusun kebijakan.

Praktisi

Bank melakukan *sharing experience* dengan praktisi perbankan yang lebih awal dan berpengalaman dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan. Diharapkan Pengalaman dari bank atau lembaga lain membantu dalam memahami pendekatan yang sudah terbukti berhasil, termasuk cara sederhana mengintegrasikan ESG tanpa membebani operasional.

Pegawai

Karyawan BPR Putra Mahkota Mandiri, memiliki peran mengimplementasikan kebijakan dan strategi keuangan berkelanjutan. Membangun budaya kerja yang berorientasi pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta mengikuti pelatihan dan mengkampanyekan terkait isu isu keberlanjutan

Nasabah

Nasabah, memiliki peran menjadi pengguna produk keuangan berkelanjutan. Menjadi mitra dalam penerapan proyek hijau dan usaha sosial serta memberikan umpan balik terhadap praktik Bank atas penerapan keuangan berkelanjutan.

Lainnya

Asosiasi perbankan/ Perbarindo berperan sebagai wadah koordinasi dan berbagi praktik baik antar BPR. Melalui forum ini, bank dapat memperoleh contoh implementasi Keuangan Berkelanjutan, mengikuti pelatihan bersama, dan menyuarakan kendala kepada regulator.

Umpan Balik

Sebagai upaya membangun komunikasi dua arah dengan para pemangku kepentingan dan evaluasi serta peningkatan kualitas Laporan Keberlanjutan di masa mendatang, PT BPR Putra Mahkota Mandiri menyediakan Lembaran Umpan Balik yang dapat diisi pembaca pada bagian akhir Laporan Keberlanjutan ini.

Melalui dokumen ini, kami sangat menghargai saran, masukan, pendapat, dan kritik membangun dari para pembaca laporan. Semua tanggapan yang kami terima akan menjadi referensi penting bagi penyusunan laporan keberlanjutan selanjutnya yang lebih baik dan relevan.

Kami juga berkomitmen menyediakan akses informasi yang luas serta transparan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, mitra kerja, dan masyarakat umum yang ingin menyampaikan masukan terkait laporan ini. PT BPR Putra Mahkota Mandiri membuka akses informasi sekomprehensif mungkin untuk menerima umpan balik (feedback) mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi layanan customer service BPR Putra Mahkota Mandiri di kontak 081298404004 atau ke alamat Email bprputramahkotamandiri@gmail.com

Bagi PT. BPR Putra Mahkota Mandiri penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 ini merupakan yang kedua kalinya. Untuk Laporan Keberlanjutan sebelumnya belum mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan, meskipun demikian Bank akan terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi segenap pembaca.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025
PUTRA MAHKOTA MANDIRI**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2025 telah disusun sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 27 April 2026

PUTRA MAHKOTA MANDIRI


YUNI WULANDARI PUTRI, SE, Ak
Direktur Utama


SYAFRIL S.sos
Direktur


Herry Amin, SE
Komisaris Utama


Hj. Fatmawati, SKM, MM
Komisaris



PT BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI

Jl Jend Sudirman No 7 D, Pekanbaru – Riau

Website : bprputramahkotamandiri.com Telepon : 0761-8406926

LAPORAN DEMOGRAFI PEGAWAI PT. BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI TAHUN 2025

1. Berdasarkan Level Organisasi

NO	DESKRIPSI	Jumlah
1	Komisaris	2
2	Direksi	2
3	Pejabat Eksekutif	4
4	Staff	10
	Total	18

2. Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	DESKRIPSI	Jumlah
1	Pegawai Tetap	6
2	Pegawai Tidak Tetap	8
	Total	14

3. Berdasarkan Pendidikan

NO	DESKRIPSI	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	1
2	Sarjana (S1)	8
3	Diploma (D3)	-
4	SMA Sederajat	5
	Total	14

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	DESKRIPSI	Jumlah
1	Laki-Laki	8
2	Perempuan	6
	Total	14

5. Berdasarkan Rentang Usia

NO	DESKRIPSI	Jumlah
1	Usia < = 25 tahun	1
2	Usia > 25 – 35 tahun	9
3	Usia > 35 – 45 tahun	2
4	Usia > 45 – 55 tahun	1
5	Usia > 55 tahun	1
	Total	14



PT BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI

Jl Jend Sudirman No 7 D, Pekanbaru – Riau

Website : bprputramahkotamandiri.com Telepon : 0761-8406926

Terima kasih atas kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk membaca Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) PT BPR Putra Mahkota Mandiri ini. Guna meningkatkan kualitas dan kelengkapan Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang kami berharap kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk mengisi Lembar Umpan Balik yang telah disiapkan di bawah ini, dan mengirimkannya kembali kepada kami.

1. Laporan Keberlanjutan ini telah menyediakan informasi mengenai berbagai hal yang telah dilaksanakan PT BPR Putra Mahkota Mandiri dalam pemenuhan kewajiban terhadap pengaturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Bank.
☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu
2. Materi Laporan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai aspek kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan hidup pada PT BPR Putra Mahkota Mandiri.
☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu
3. Materi dalam Laporan Keberlanjutan ini, termasuk data dan informasi yang disajikan sudah cukup lengkap.
☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu
4. Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang.
☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu
5. Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan.
☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu
6. Laporan Keberlanjutan ini menarik dan mudah dibaca.
☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Tidak Tahu
7. Informasi apa saja yang dirasakan kurang dan harus dilengkapi dalam Laporan Keberlanjutan di masa mendatang?
8. Mohon berikan saran dan komentar terhadap Laporan Keberlanjutan ini.



PT BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI

Jl Jend Sudirman No 7 D, Pekanbaru – Riau

Website : bprputramahkotamandiri.com Telepon : 0761-8406926

Profil Anda

Nama :
Pekerjaan :
Institusi/Perusahaan :
Kontak (telepon, e-mail) :

Kategori Pemangku Kepentingan

☐ Pemerintah ☐ Media ☐ Nasabah ☐ Karyawan
☐ Mitra Usaha ☐ Masyarakat ☐ LSM ☐ Lain-Lain

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam laporan ini mohon dikirim ke:

PT BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI

Jln Jenderal Sudiman No 7 D, Pekanbaru

Telepon : 081298404004

Website : bprputramahkotamandiri.com

E-mail : bprputramahkotamandiri@gmail.com

